



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 2017



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2017 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2017 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro yang tertuang melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/54/KEP/412.013/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

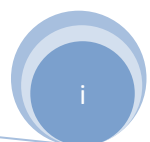
Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi mencapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bojonegoro dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Bojonegoro, 31 Desember 2017
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro
Ketua

KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 198602 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bojonegoro	1
1. Regulasi Pelayanan Informasi	2
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan SKPD	5
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	8
1. Sarana dan Prasarana	10
2. Anggaran PPID	17
3. Daftar Informasi Publik	17
4. Permohonan Informasi Publik	19
5. Sengketa Informasi Publik	28
Kendala dan Pengembangan	29
1. Kendala	29
2. Pengembangan/ Inovasi	30
3. Rencana Tindak/ Target Tahun 2017	33
Penutup	35
Dokumentasi	37
Indikator Penilaian Festival Keterbukaan Pemerintah Desa Tahun 2017	
Laporan Hasil Penilaian Festival Keterbukaan Pemerintah Desa Tahun 2017	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	6
Gambar	2	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro	11
Gambar	3	Kantor Desk Layanan PPID	12
Gambar	4	Desk Layanan PPID SKPD	13
Gambar	5	Desk Layanan PPID Dialog Publik	14
Gambar	6	SIAP LAPOR	15
Gambar	7	Publikasi Layanan Informasi	16
Gambar	8	Layanan Informasi DIP Pada Web PPID	18
Gambar	9	Layanan Informasi DIP Pada Web PPID SKPD	19
Gambar	10	Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!	25
Gambar	11	Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!	25
Gambar	12	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!	26
Gambar	13	Grafik Permohonan Informasi Melalui Radio Malowopati ...	27
Gambar	14	Grafik Permohonan Informasi Melalui Dialog Publik.....	28
Gambar	15	MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute dan Sinergantara	30
Gambar	16	Launching Website desa oleh Bupati Bojonegoro	31

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo	3
Tabel	2	Data PPID Kabupaten , SKPD dan BUMD	7
Tabel	3	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk	20
Tabel	4	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi	20
Tabel	5	Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	28



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID Kabupaten. Dinas Kominfo sebagai PPID utama yang didukung oleh seluruh PPID pembantu yang ada di tiap SKPD dan disahkan dengan SK Bupati Bojonegoro Nomor: 188/54/KEP/412.013/2017 Tanggal 21 Januari Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, sedangkan PPID pembantu di masing-masing SKPD ditetapkan dengan SK dari Ketua PPID masing-masing SKPD. Ketua PPID di SKPD adalah kepala SKPD itu sendiri. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID,

yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

Penjabaran kebijakan pelayanan informasi publik, teruraikan dalam : (1) regulasi pelayanan informasi publik ; (2) PPID Kabupaten dan PPID SKPD.

1. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 memiliki visi yang besar dimana visi tersebut adalah : **“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”**, dimana pada MISI yang ke-3: **“Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Aksesibilitas bagi Warga Terhadap Informasi Pembangunan”**. Adapun strategi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi tepat guna dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk peningkatan akses komunikasi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan informasi serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.

Sejalan dengan RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menjabarkan dalam visi: **“Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi”**. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Government
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi publik

Pada penjabaran Misi 2: Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi publik **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan informasi dan pengelolaan partisipasi publik **Indikator:** Persentase peningkatan kualitas dan cakupan penyebarluasan informasi serta pengelolaan partisipasi publik, sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya publikasi informasi dan pemberdayaan KIM berbasis IT	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT
		Persentase publikasi informasi melalui lembaga profesi yang bermitra
2	Meningkatnya eksistensi PPID, pengelolaan data dan partisipasi publik	Persentase PPID Perangkat Daerah dan Desa yang sesuai regulasi
		Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistik daerah

Untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, dijabarkan dalam strategi Menyediakan informasi serta sarana penyampaian aspirasi publik. Sedangkan kebijakannya adalah:

1. Mengembangkan eksistensi PPID SKPD dan Desa
2. Mengembangkan komunikasi antara masyarakat dengan pimpinan Pemerintah Kabupaten melalui dialog langsung dan media lainnya (cetak, elektronik dan online)

Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan akhir Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- e. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3).
- f. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (TKBP3) Daerah.
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/234/KEP/412.11/2016 tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode 2015–2018.
- j. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/54/KEP/412.013/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2017
- k. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/037/412.45/2014 tentang Standar

Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

- l. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/038/412.45/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- m. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/068/412.45/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

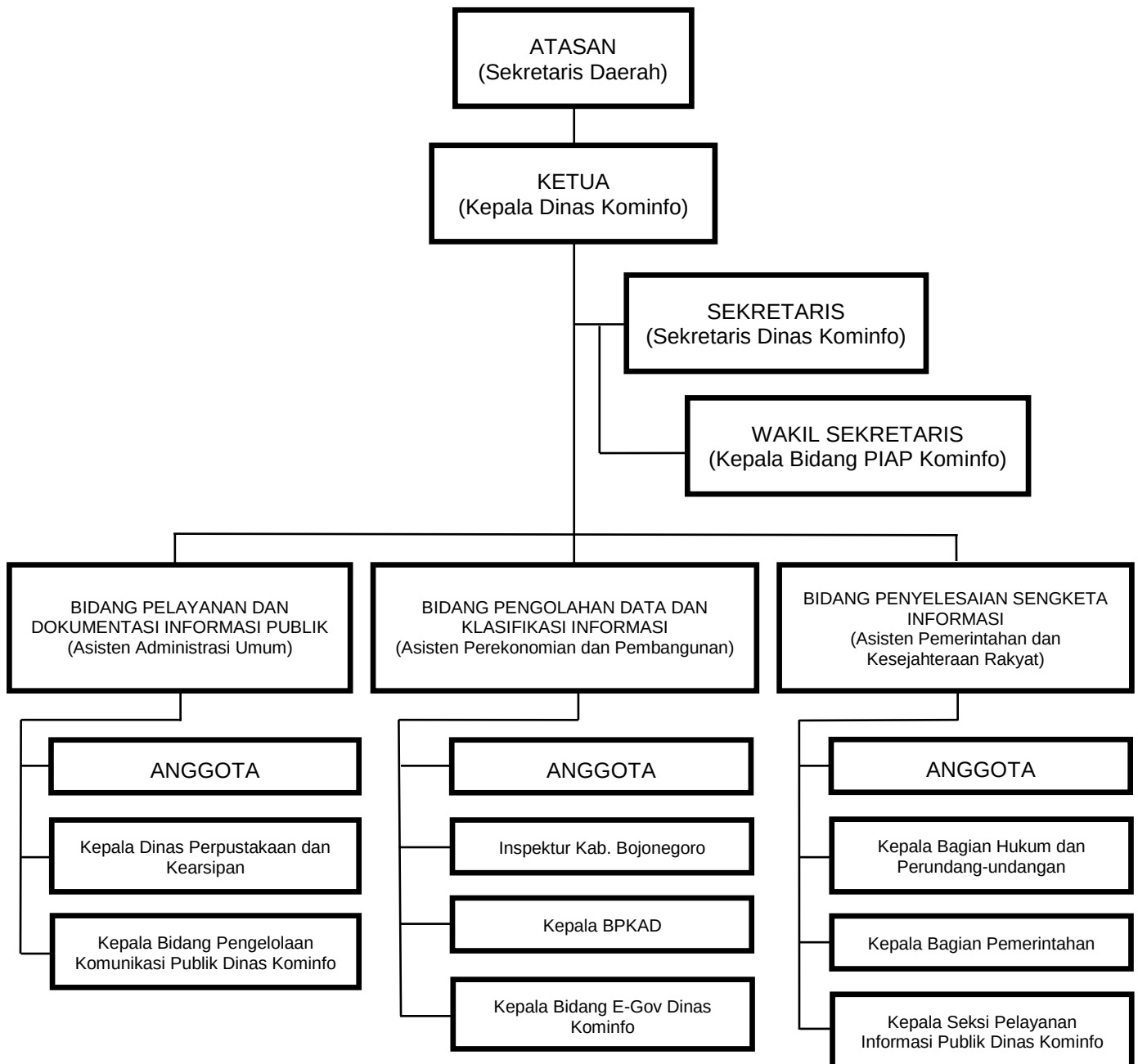
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), Asisten Sekretaris Daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Gambar 1

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017



Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID, sebagai berikut :

Tabel 2
Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD

No.	URAIAN	JUMLAH				PERSONIL	KET.
		PPID	Ada	belum	SK		
1.	PPID Kabupaten	1	1		1	15	
2.	SKPD						
	a. Badan	6	6		6	99	
	b. Dinas	24	24		24	291	
	c. Inspektorat	1	1		1	8	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	6	
	e. Kecamatan	28	28		28	252	
	f. RSUD	3	3		3	17	
	g. BUMD	4		4			
	h. Satpol PP	1	1		1	13	
JUMLAH		69	65	4	65	701	

Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring (Sismon)

Organisasi PPID SKPD, diketuai oleh Sekretaris untuk lingkup Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, sedangkan untuk Satpol PP oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, untuk Sekretariat DPRD dan Direktur RSUD oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Masing-masing atasan langsung dari PPID adalah para Kepala SKPD. Struktur organisasi PPID Kabupaten maupun SKPD meliputi Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Guna menjamin ketersediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam otonomi daerah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang dapat mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. **Akuntabilitas**

Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Kondisional**

Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. **Partisipatif**

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan semua aktivitas, merupakan kekuatan tersendiri, serta menjadikan spirit kerja untuk bersinergi mencapai target kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (Kang Yoto - Kang Hartono), memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui Facebook, Instagram, Twitter. Whatsapp, layanan

online, SMS langsung, SMS Radio Malowopati FM, Forum Radio, dialog interaktif/dialog publik.

Untuk penguatannya, juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik NGO yang ada di Bojonegoro, antara lain Bojonegoro Institut (BI), Institute Development of Society (IDFoS), Sinergantara, Mediatrac, HIVOS terkait dengan keterbukaan pengelolaan minyak dan gas bumi bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Tahun 2017 ini para pihak telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) mendampingi Bojonegoro dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Aksi daerah di bidang Pemerintahan terbuka/Open Government, hal ini terkait pula dengan terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai kota kecil menjadi percontohan pemerintahan terbuka bersama 14 kota di dunia yang tergabung dalam Open Government Patnership (OGP), di tahun 2017 beranggotakan 75 Negara.
2. TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan Big Data/ Revolusi Data, data Dasa Wisma by name by address yang meliputi 300 indikator mulai pekerjaan, pendidikan, ODF, jumlah tanaman yang dimiliki.
3. Beberapa NGO berskala Nasional dan Internasional bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi dalam penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni INFID (International NGO Forum on Indonesian Development).

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilakukan penyediaan informasi yang berada pada 2 (dua) tempat, yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pemkab Bojonegoro jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro dan pada Desk Layanan Informasi PPID di jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Berbagai fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro, tidak menyatu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro yang berada di lantai 3, Layanan PPID Corner berada di lantai 1 depan pintu masuk sebelah Utara Gedung Pemkab Bojonegoro, selain desk PPID utama yang berada di lantai 1 gedung Pemkab Bojonegoro, PPID juga masih melayani permintaan informasi di Kantor PPID lama yaitu di Gedung media Center yang berada di Komplek gedung Radio Malowopati FM Bojonegoro, Jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan supaya pemohon informasi yang belum mengetahui bahwa desk PPID telah pindah ke Gedung baru masih bisa terlayani, juga untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pada Media Center sekaligus sebagai pusat bertemunya dari komunitas jurnalis/media. Dengan demikian, akan dapat memberikan dukungan langsung terhadap berbagai sinergitas informasi.

Gambar 2
Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Kabupaten Bojonegoro



Desk layanan informasi PPID Kabupaten yang berada di lantai 1 gedung pemkab Bojonegoro dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten berukuran 5 x 5 meter, dilengkapi dengan set ruang tamu, desk pelayanan informasi, 1 buah Personal Computer terkoneksi internet, Jaringan wifi gratis, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 1 (Satu) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital 1 unit Televisi untuk menampilkan kegiatan-kegiatan PPID dan keterbukaan juga informasi infografis lain tentang bojonegoro. Sedangkan Desk PPID di Jalan AKBP M. Suroko (media Centre) dilengkapi dengan fasilitas berupa set ruang tamu/tunggu, kamar mandi, dapur, front desk informasi, 10 unit PC terkoneksi internet, jaringan wifi gratis, 1 (satu) unit scan, 3 (tiga) unit pendingin ruangan, display monitor tv 42", papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur

permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital.

Ruang PPID dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak, disamping itu juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT, di sisi lain pemohon informasi lebih mudah mengakses informasi karena didukung oleh sarana yang lebih baik dan jarak yang lebih dekat dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. Ruang PPID yang berada di Media Center dan menyatu dengan layanan permohonan informasi dan dokumentasi juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT. Di sisi lain, apabila terdapat pendengar radio Malowopati FM, yang membutuhkan kejelasan informasi, dapat langsung terkoneksi dengan layanan PPID. Khusus papan informasi, PPID Bojonegoro memiliki papan informasi di samping desk layanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, selain itu juga ada papan informasi di seluruh Kecamatan dan di area umum/tempat strategis.

Gambar 3
Kantor Desk PPID Kabupaten Bojonegoro



b. Desk Layanan Informasi PPID SKPD.

Untuk desk layanan informasi pada SKPD, berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasarana penunjang hampir sama dengan sarana prasarana yang ada di PPID Kabupaten. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan IT dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID. Beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

Gambar 4
Desk Layanan PPID SKPD



c. Desk Layanan Informasi Forum Dialog

Desk Layanan Informasi Forum Dialog merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD yang melekat pada kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.00 WIB di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pemohon informasi permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.

Gambar 5
Desk Layanan PPID Dialog Publik



Apabila dalam pelayanan desk mobile ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat dapat terlayani dalam system LAPOR sehingga relative tidak ada permohonan yang tidak terlayani. Desk layanan informasi mobile.

d. Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>.

Pada tahun 2015, aplikasi LAPOR! telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi

Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistim aplikasi LAPOR!, yakni Sistem Integrasi Aspirasi Publik - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR).

Gambar 6
SIAP LAPOR!



Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR!,

- Menggunakan SMS: ketik BJN(spasi), isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- Menggunakan twitter: login via twitter di www.lapor.go.id , sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi), isi laporan, mention @pemkab.bjn
- Menggunakan SMS ke Hallo Bupati nomor: 08113406688

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

Hal-hal yang diintegrasikan adalah, semua pengaduan pada WhatsApp Bupati, Pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor HP: 08113322958, pengaduan Facebook, Pengaduan Instagram, pengaduan melalui Twitter, pengaduan melalui group

WhatsApp: kerja cepat tepat manfaat, monitoring keuangan dan pembangunan, sapa keluarga dengan kasih (sagasih), layanan beras keluarga sejahtera (rastra), berita jonegoroku. Prinsip yang diatur pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013, bahwa semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilih dan dijadikan ide dalam pembangunan. Salah satunya adalah ide pembangunan jalan dengan paving.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan berita harian Jawa Pos Radar Bojonegoro, yakni terkait dengan berbagai pengaduan, keluhan baik yang langsung dari pembaca melalui Twitter Radar Bojonegoro maupun dari wartawan Radar Bojonegoro. Berbagai keluhan, pengaduan tersebut diidentifikasi menjadi bagian permohonan informasi yang diteruskan kepada SKPD terkait.

Gambar 7
Publikasi Layanan Informasi



2. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sebesar Rp. 218.430.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 143.370.000,- sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 125.800.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 84.800.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - Kegiatan : pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar 61.160.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 29.500.000,-
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 31.470.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 29.070.000,-

Untuk PPID SKPD, penganggarnya diikutkan di Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan akhir Tahun 2017 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 570.

Gambar 8
Layanan Informasi DIP pada Web PPID

Jl. AKBP M Soeroko 11 Bojonegoro (0853) 881454 ppidbojonegoro@gmail.com Jam Layanan 08:00 s/d 15:00

Search

www.ppid.bojonegorokab.go.id

PPID KABUPATEN BOJONEGORO

Hal. Anda untuk tahu!

[Beranda](#)
[Profil](#)
[Layanan Informasi](#)
[Informasi Publik](#)
[Laporan PPID](#)
[Transparansi](#)
[Galeri](#)
[Kontak](#)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BOJONEGORO

Home [Daftar Informasi Publik Bojonegoro](#)

Show entries
Search:

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A Profil Kabupaten Bojonegoro											
1	Sejarah Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat/Download
2	Makna Lambang Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang arti dari bentuk, warna dan gambar yang terdapat pada lambang pemerintah kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat/Download
3	Visi Misi Kabupaten Bojonegoro	Berisi Visi dan Misi kepemimpinan masa jabatan Bupati dan wakil Bupati	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat/Download
4	Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang gambaran umum letak geografis atau posisi Kabupaten Bojonegoro, Kondisi Iklim Kabupaten Bojonegoro,	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat/Download

Gambar 9
Layanan Informasi DIP Pada Web PPID SKPD



KECAMATAN MARGOMULYO
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

[Home](#) [Profil](#) [Berita](#) [Agenda](#) [Gallery](#) [PPID](#)

Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik Kecamatan Margomulyo : Kabupaten Bojonegoro									
No.	Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Se Me
1	margo.01	Kedudukan domisili dan alamat lengkap	Kedudukan domisili dan alamat lengkap Kecamatan margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Terdiri dari , Alamat, Nomor Fax/Tlp. dan E-mail)	Sekretaris	Kec. Margomulyo	Softcopy, hardcopy dan website	V		
2	margo.02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Kecamatan margomulyo Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Margomulyo	Softcopy, hardcopy dan website	V		
3	margo.03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan margomulyo Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Margomulyo	Softcopy, hardcopy dan website	V		
4	margo.04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Kecamatan margomulyo Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Margomulyo	Softcopy, hardcopy dan website	V		

DIP Kecamatan Margomulyo

4. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2017 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan online, adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik Jum'at) adalah seputar Infrastruktur dan pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk
Tahun 2017

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	3	2	3	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	1	4	0	0	0	0	0
4	3	2	3	0	0	0	0	0
5	2	5	2	0	0	0	0	0
6	3	+10	3	0	0	0	0	0
7	5	8	5	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	2	2	0	0	0	0	0
10	7	5	7	0	0	0	0	0
11	3	5	3	0	0	0	0	0
12	3	4	3	0	0	0	0	0
JML	35		35	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 35 (tiga puluh lima) atau 100%, dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi
Tahun 2017

No Register	Pemohon	Isi Permohonan	Kegunaan	Status
1	2	3	4	5
01/I/PPID/BJN/2017	STIE Cendikia Bojonegoro	1. Buku, Artikel dan Foto tentang OGP 2. Artikel dan Foto Tentang Prestasi Pemkab Bojonegoro 3. Buku, Artikel dan Foto tentang indikator keberhasilan OGP Bojonegoro 4. Buku, Artikel, foto Festival OGP di Bojonegoro	Untuk bahan mengikuti lomba karya ilmiah dengan judul Indikator keberhasilan OGP Bojonegoro di kancah Nasional dan Internasional	Terpenuhi

1	2	3	4	5
02/I/PPID/BJN/2017	M. Noor Ariansyah, S.STP	SOP, SK admin tim LAPOR Perbup Pembentukan OPD baru Bojonegoro	Untuk studi replikasi dan inovasi serta pengembangan wilayah di Banjarmasin	Terpenuhi
03/I/PPID/BJN/2017	Anton Silalahi	Permohonan permintaan dialog publik di Desa	Dialog publik diadakan di Desa	Terpenuhi
04/III/PPID/BJN/2017	Dian Wahyu Setiawan	Data tentang OGP/Keterbukaan	Untuk bahan penelitian skripsi	Terpenuhi
05/III/PPID/BJN/2017	Nur Wahid	Data mengenai Gerakan Desa Sehat dan Cerdas	Pembuatan Skripsi	Terpenuhi
06/III/PPID/BJN/2017	Oliver June Mochtar Turnip	Informasi tentang OGP Kolaborasi ABGC Keterbukaan informasi publik di Bojonegoro	Penelitian skripsi fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang	Terpenuhi
07/III/PPID/BJN/2017	Galang Gerald, W.IP	Data tentang OGP di Bojonegoro	Penelitian dalam rangka Seminar dan Jurnal	Terpenuhi
08/IV/PPID/BJN/2017	Arya Betha Yustiawan, S.kom	Laporan pengaduan masyarakat (LAPOR) dan data dialog publik	Studi banding banchmarking	Terpenuhi
09/IV/PPID/BJN/2017	Andreas Pawelke (Direktur Open data Labs)	Data Kesehatan	Studi kelayakan penerapan satu data dilingkungan Pemkab Bojonegoro	Terpenuhi
10/IV/PPID/BJN/2017	Diana Ruhmanasari	LKPD tahun anggaran 2015	Untuk keperluan tugas akhir	Terpenuhi
11/V/PPID/BJN/2017	Bojonegoro Institute	Hasil pembahasan dan draf dokumen AMDAL RKL dan RPL Peningkatan produksi minyak di lapangan Banyuurip-Blok Cepu oleh ExxonMobil	Bahan kajian tim internal Bojonegoro Institute	Terpenuhi
11b/V/PPID/BJN/2017	Nunung Rosida	Renstra, Sakip, Renja, KIM	Untuk studi tiru Pemkab Nganjuk	Terpenuhi
11c/VI/PPID/BJN/2017	Nurdian	Data jumlah keluarga miskin di Kecamatan Trucuk Data jumlah peserta PKH di Kecamatan Trucuk Data jumlah penerima bantuan DAK Pendidikan Data penerima bantuan lainnya di Kecamatan Trucuk	Bahan penulisan tesis	Terpenuhi
12/VI/PPID/BJN/2017	Gunaidik	APBDes 2015-2016 Desa Betet Kecamatan Kasiman SPJ APBDes 2015-2016 Desa Betet Kecamatan Kasiman Berita acara lelang bondo Deso dan bengkok 2015 dan 2016 Desa Betet Kecamatan Kasiman	Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	Terpenuhi

1	2	3	4	5
13/VI/PPID/BJN/2017	Happy Norvitha Ayuni	Konsep Money Follow Problems untuk penyusunan anggaran di Kab. Bojonegoro	Sebagai bahan referensi untuk proposal penelitian skripsi di Universitas Airlangga, Surabaya	Terpenuhi
14/VII/PPID/BJN/2017	Surgi	Perda Keterbukaan Informasi (Perbup No 40 tahun 2014 dan Perbup No 10 tahun 2017)	Sebagai acuan peraturan Daerah Bojonegoro	Terpenuhi
15/VII/PPID/BJN/2017	Muhartono	Anggaran yang diserap Dispenda beserta rinciannya tahun 2014 s/d 2016 Seperti Gaji pokok, TPP, honor, perjalanan dinas, jasa pungut pajak dan kegiatan	Untuk kajian diskusi kelompok	Terpenuhi
16/VII/PPID/BJN/2017	Bambang Laras Muji Satoto	Peningkatan Jaringan Listrik, Instalasi Hemodialisa dan Oksigen sentral RSUD Sosodoro Djatikusumo Tahun 2015	Bahan pengkajian dalam rangka pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Bojonegoro	Terpenuhi
17/VII/PPID/BJN/2017	Dwi Cahyo Utomo, ME	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) 2. Dokumen Kontrak Kerja yang meliputi: SPK, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Penerimaan Barang atau Bantuan yang diberikan kepada Masyarakat, Dokumen Pendukung Lainnya Pada Paket dan paket lelang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran (TA) 2014-2015	Kontrol Publik	Terpenuhi
18/VII/PPID/BJN/2017	Gunaidik	1. APBDes 2015-2016 Desa Tlatah Kecamatan Purwosari 2. SPJ APBDes 2015-2016 Desa Tlatah Kecamatan Purwosari 3. Berita Acara Lelang Bando Deso dan Bengkok 2015 dan 2016 Desa Tlatah Kec. Purwosari	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. PMK No. 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	Terpenuhi

1	2	3	4	5
19/IX/PPID/BJN/2017	Hamim	Contoh Ijazah Radio	Fc ijin radio Malowopati, daftar kanal di BJN, formulir persyaratan pendirian radio	Terpenuhi
20/IX/PPID/BJN/2017	Laely Rifatin	Buku PNFI kota	Untuk Laporan Database	Terpenuhi
21/X/PPID/BJN/2017	Edi Masrur, SH., MM.	SK PPID, Adm Kelengkapan Festival Keterbukaan Anggaran	Study Tiru	Terpenuhi
22/X/PPID/BJN/2017	Partiwi Agustia	1. SOP Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi Publik 2. Perbup/SK Bupati dalam Pelayanan Pengaduan dan pelayanan informasi publik 3. struktur organisasi PPID dan PPID Pembantu	Sebagai Contoh untuk Pemkab Gresik	Terpenuhi
23/X/PPID/BJN/2017	Zahrina Arum Nabilah	1. SK City Branding, Survei 2. Data Perkembangan media online	Penelitian / Skripsi	Terpenuhi
23.B/X/PPID/BJN/2017	Rizal / IDFoS	1. Dokumen APBD perubahan tahun 2017, Laporan realisasi anggaran 2016 dan 2017 semester 1 Kab. Bojonegoro 2. Data jumlah angkatan kerja terbaru Kab. Bojonegoro 3. Data Jumlah penduduk miskin terbaru Kab. Bojonegoro 4. Data jumlah pengangguran terbaru Kab. Bojonegoro 5. Data Jumlah pencari kerja terbaru Kab. Bojonegoro 6. Data kondisi dan jumlah lapangan kerja di Bojonegoro 7. Data Jumlah anak sekolah dari SD sederajat sampai Sarjana sederajat 8. Angka Partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni	Melakukan Riset untuk Need Assesment untuk Kerja Layak	Terpenuhi
24/X/PPID/BJN/2017	Kusnan	Permohonan informasi tentang anggaran	Kontrol Publik	Terpenuhi

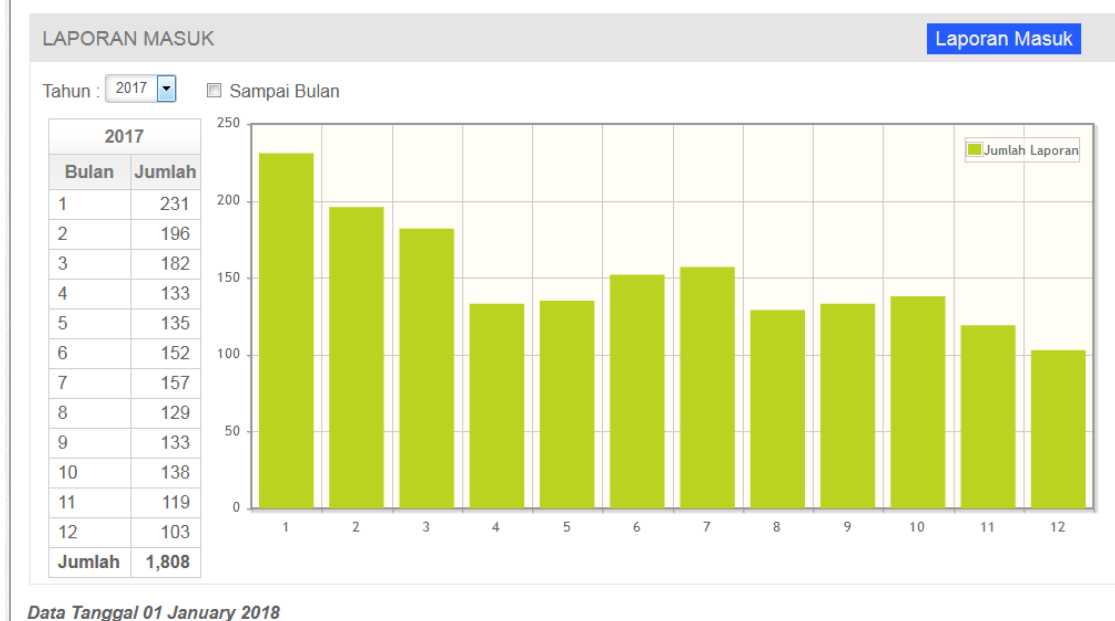
1	2	3	4	5
25/X/PPID/BJN/2017	Drs. I. Nyoman Sedana MM	Dokumen OGP, Dokumen Dialog Publik, dan Buku OGP	Pengiriman data dukung	Terpenuhi
26/X/PPID/BJN/2017	Teuku Agung Mahendra Rizki Fahreza	1. Rekapitulasi Data Dialog Publik 2. Mekanisme Agenda Dialog Publik	Penelitian/Skripsi	Terpenuhi
27/XI/PPID/BJN/2017	Lailatul Badriyah	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima dan Perbup tentang Pedagang Kaki Lima	Memenuhi Tugas Kuliah	Terpenuhi
28/XI/PPID/BJN/2017	Suci Rahayu Eka Nugraheni	Data Lapor Bulan Oktober 2017, dan Data rekap radio malowopati	Penelitian/Skripsi	Terpenuhi
29/XI/PPID/BJN/2017	Gunaidik	1. APBDes 2015-2016 Desa Begeg Kecamatan Gayam 2. SPJ/Realisasi APBDes 2015-2016 Desa Begeg Kecamatan Gayam 3. Berita Acara lelang Bondo Deso dan Bengkok 2015 dan 2016 Desa Begeg Kecamatan Gayam	Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa	Terpenuhi
30/XII/PPID/BJN/2017	Bintan Aulia Habibah	Rekap Dialog Publik Tahun 2016-2017	Penyusunan Skripsi	Terpenuhi
31/XII/PPID/BJN/2017	Surgi	LPPD Desa Kemiri Tahun 2015, 2016, dan 2017	Peran Masyarakat supaya tahu kebijakan Pemerintah Desa	Terpenuhi
32/XII/PPID/BJN/2017	Nina Maya Puspita Dewi	Data anak putus sekolah tahun 2015-2016	Untuk melengkapi data skripsi	Terpenuhi

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi melalui desk layanan informasi dari 35 pemohon informasi pada tahun 2017, yang berasal dari NGO yang di gunakan untuk pengkayaan data dan bahan diskusi, pemohon informasi berasal dari perseorangan/individu dokumen yang dimohon kebanyakan digunakan untuk bahan pembelajaran, karya ilmiah, dan penelitian.

Terkait dengan aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2017 sebanyak 1.808 aduan dan permohonan. Permohonan tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!, sebagai berikut:

Gambar 10

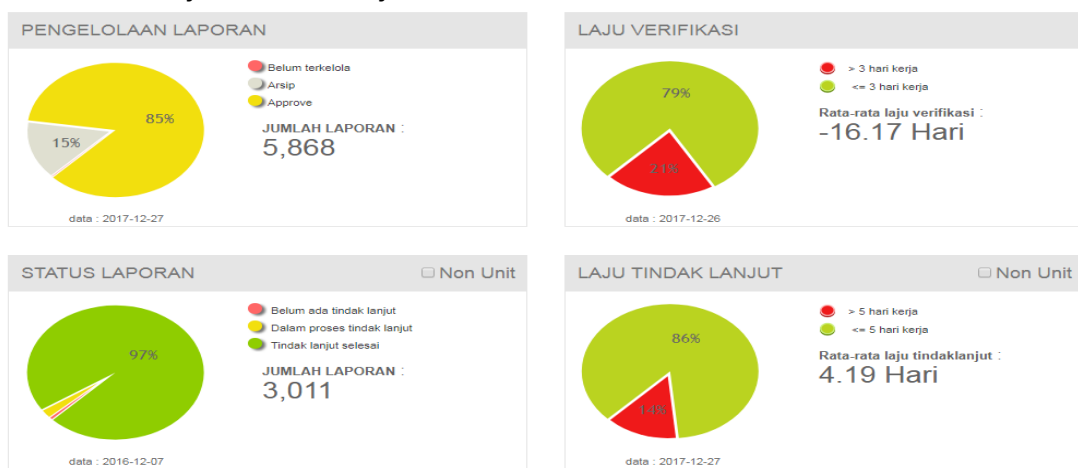
Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!



Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4,19 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik, yang setiap hari Jum'at dilaporkan oleh Ketua PPID kepada Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dalam Manajemen Review.

Gambar 11

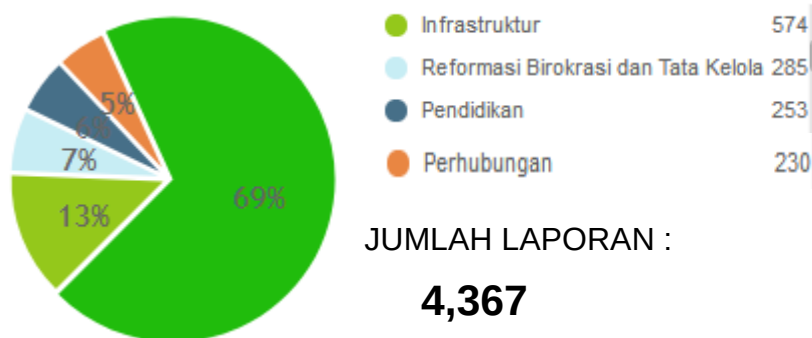
Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!



Topik Layanan informasi melalui LAPOR! di tahun 2017 ini meliputi: Infrastruktur 13%, Reformasi birokrasi 7%, Pendidikan 6%, Perhubungan 5% sedangkan sisanya 69% adalah topik lainnya dan topik terkait Lingkungan hidup, kesehatan, kesra, pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lain

Gambar 12

Topik Permohonan Informasi, dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!



Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2017 sebanyak 642 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (AyoMasyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi SMS/WA : 08113322958 dan telepon 0353-880999.

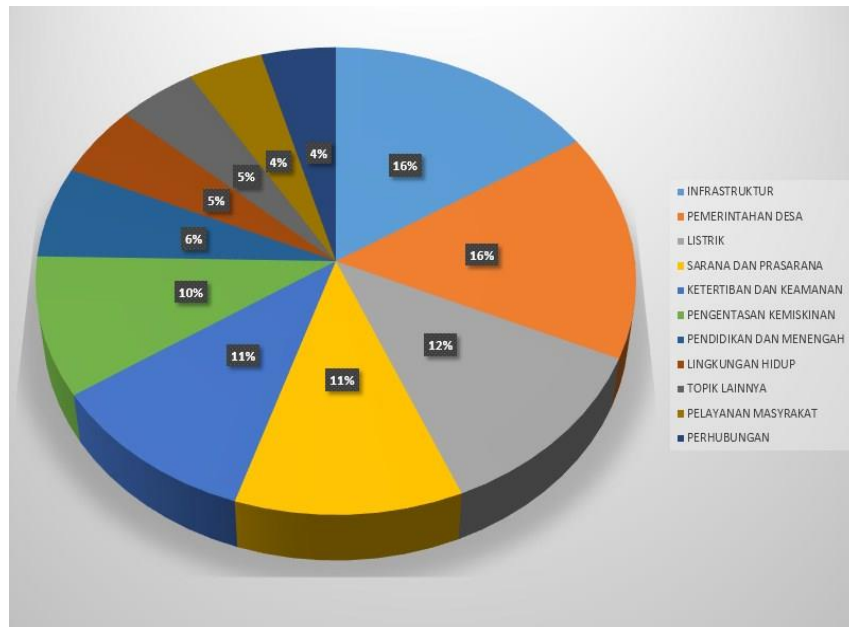
Operator/penyiar di Radio Malowopati sebanyak 5 (lima) orang menjaring laporan dari masyarakat melalui program Unit Reaksi Cepat pengelolaan aduan dengan cara komunikasi melalui Whatsapp, SMS, dan telepon. Jam siar radio malowopati mulai jam 06:00 s/d 24:00 WIB dengan rata-rata menerima 10-20 aduan masuk tiap harinya

Topik layanan informasi melalui Radio Malowopati laporan Unit Reaksi Cepat (URC) 10 kategori yang paling banyak dimohon adalah tentang: Infrastruktur 16%, Pemerintahan Desa 16%, Sarana dan

Prasarana 11%, Listrik 12%, Ketertiban dan Keamanan 11%, pengentasan kemiskinan 10%, Pendidikan 6%, Lingkungan Hidup 5%, Pelayanan Masyarakat 4%, Perhubungan 4%, dan 5% untuk topik lainnya.

Gambar 13

Grafik Permohonan Informasi Melalui Radio Malowopati (URC)

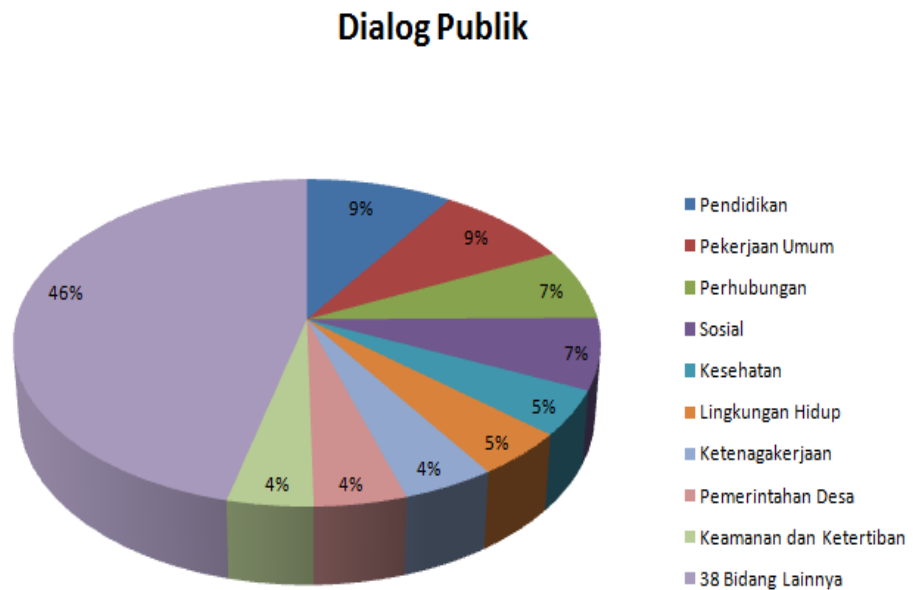


Desk layanan informasi melalui Dialog Interatif/Dialog Publik Jum'at, pada tahun 2017 sebanyak 314 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti.

Topik layanan informasi pada Dialog Publik tahun 2017 adalah Pendidikan 9%, Pekerjaan Umum 9%, Perhubungan 7%, Sosial 7%, Kesehatan 5%, Lingkungan Hidup 5%, Ketenagakerjaan 4%, Pemerintah Desa 4%, Keamanan dan Ketertiban 4%, Lainnya 46% meliputi sektor Kependudukan Capil, Pengairan, Kepegawaian, Peternakkan/Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Pertanahan Pemerintahan Umum, dan Pertanian.

Gambar 14

Grafik Permohonan Informasi Melalui Dialog Publik



Pelaksanaan dialog publik yang dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga bulan Desember tahun 2017 (Periode I tahun 2008 s/d 2012 sebanyak 198 kali dan Periode II tahun 2013 s/d 2017 sebanyak 208 kali), disiarkan secara on-air pada Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio kota 89,1 FM. Pada tahun 2017 ini, Dialog Publik terlaksana 41 kali.

5. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permohonan informasi kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 5
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kendala dan Pengembangan

Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian ini, berbagai kendala dan kelemahan dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi.

1. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kabupaten Bojonegoro, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal
- b. Belum seluruh SKPD/Badan Publik komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum optimal dalam membantu layanan informasi publik
- c. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi publik (Desk Layanan Informasi) maupun anggaran operasional kegiatan pada SKPD/Badan Publik
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT
- f. Masyarakat masih belum memahami hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi manfaat informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon

- g. Adanya permohonan informasi yang tidak serius dan belum memahami SOP pelayanan permohonan informasi
- h. Kurangnya feedback atau bukti kontrol sosial dari para pemohon informasi setelah informasi yang diminta diberikan

2. Pengembangan/Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, PPID Bojonegoro telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder/mitra profesi, antara lain:

- a. Media cetak Radar Bojonegoro, yakni terkait berbagai informasi masyarakat yang menjadi headline pemberitaan sekaligus permohonan informasi melalui “twitter” dan “mata radar” dalam mekanisme keterbukaan informasi publik.
- b. CSO Bojonegoro Institute, Sinergantara dan Mediatrack, yakni Nota Kerjasama kesepahaman antara Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute, Sinergantara, Mediatrack tentang pengembangan dan implementasi inisiatif Revolusi Data dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 15

MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute dan Sinergantara



- c. Forum Radio Bojonegoro (12 Radio) tentang akses saluran informasi masyarakat melalui media radio. Para pengelola radio yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro, diberikan keleluasaan untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan/ mengemas penyampaian aspirasi tersebut sesuai style dari radio masing-masing,
- d. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT, yaitu dengan masing-masing KIM membuat blog. Melalui blog KIM tersebut dapat dipublikasikan berbagai potensi dan kegiatan pemerintahan desa termasuk publikasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran desa. Hingga saat sekarang telah terbentuk sejumlah 68 blog KIM.
- e. Rintisan PPID Desa, dalam upaya mewujudkan Sistem Layanan Informasi Desa (SLID) PPID Bojonegoro melalui pembangunan web desa (webdes) dengan domain desa (nama desa.id), salah satunya adalah desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo <http://pejambon-bjn.desa.id/transparansi-desa/>. Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo ini mendapatkan penghargaan sebagai Web Desa Terinovatif Pertama dalam PPID Award tahun 2017. Pada tahun 2017 terbangun 68 web desa, target kami memfasilitasi aktivasi web desa sebanyak 70% dari 419 desa Se-Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 16

Launching Website desa oleh Bupati Bojonegoro



- f. Instruksi Bupati Bojonegoro tentang keterbukaan informasi Pemerintahan desa yang pada prinsipnya berisi mewajibkan Kepala Desa mengumumkan perencanaan dan kegiatan dalam bentuk banner, spanduk berisi besaran anggaran di desa, kegunaan anggaran, lokasi dan penanggungjawabnya serta rencana anggaran dan kegunaannya untuk tahun berikutnya, memberikan contact person apabila ada saran, usulan dan pertanyaan dari masyarakat
- <http://ppid.bojonegorokab.go.id/instruksi-bupati-bojonegoro-dalam-rangka-pelaksanaan-ogp/>
- g. SIAP LAPOR! adalah Sistem Integrasi Aplikasi Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yakni seluruh layanan informasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro baik melalui Dialog Publik, SMS Malowopati, Desk PPID maupun media layanan lainnya diintegrasikan dalam aplikasi LAPOR, sehingga aduan, saran, kritik, permohonan informasi yang belum dijawab/ditindaklanjuti/dikabulkan akan teridentifikasi dengan jelas melalui aplikasi ini. Setiap jum'at pagi, responsibilitas Badan Publik terhadap layanan informasi secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Bupati bersama-sama Kepala SKPD.
- h. Aplikasi Dasawisma Merupakan revolusi data yang sedang dikembangkan ditahun ini yakni pendataan detail di tingkat Dasawisma Desa, dalam pelaksanaannya melibatkan peran masyarakat/PKK Desa tingkat Dasawisma. Data ini merupakan data dasar terdiri dari 300 kolom yang menjelaskan dari indikator Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) meliputi 20 (dua puluh) indikator. Dengan terumuskannya data dasar desa, maka kebutuhan data dan informasi bagi masyarakat pemohon informasi akan secara cepat dapat terpenuhi.
- i. Mediatrack bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten Bojonegoro telah membangun aplikasi Big Data untuk mensukseskan Open Government.

- j. Aplikasi open Data Kontrak berbasis online yang akan diluncurkan pada awal 2018, merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik yang ingin diketahui.

3. Rencana Tindak dan Target Tahun 2018

Rencana Aksi Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, disamping melanjutkan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang sudah ada yakni adanya dialog jum'at, SIAP LAPOR, Sistem Monitoring/pantau yang terkoneksi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) maupun berbagai aksi Keterbukaan Informasi lainnya juga di tahun 2018 meneruskan kegiatan Keterbukaan Informasi yang berbasis kolaboratif dengan 4 (empat) sekawan (Akademisi, Bussinesman, Government, Community). Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, Peningkatan Transparansi Sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang kesemuanya tersebut masuk menjadi Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di ajang Open Government Patnership Dunia.

Selain itu untuk mendukung kegiatan Rencana Aksi di tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menetapkan berbagai regulasi guna mendukung Keterbukaan Informasi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Pemerintah Desa serta rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID SKPD/pembantu agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke PPID Utama mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Peningkatan kualitas layanan informasi publik baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan;

3. Peningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
4. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Penutup

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2017 PPID Kabupaten Bojonegoro yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Kategori Web Desa Terinovatif Pertama untuk Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
2. Kategori Transparansi Anggaran Terbaik III dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
3. PPID Terbaik ke III Kab/Kota Kategori “A” (Sangat Terbuka) dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
4. Kategori Website Terbaik ke II Kab/Kota dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
5. Juara 1 Lomba Blog KIM Jawa Timur oleh KIM Sendang potro, Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari Bojonegoro dalam Pekan KIM Jawa Timur IX Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
6. Juara 2 Lomba Blog KIM Jawa Timur oleh KIM Deru maju, Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro dalam Pekan KIM Jawa Timur IX Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
7. Juara Harapan 1 LCCK KIM Jawa Timur oleh KIM Sendang potro, Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari Bojonegoro dalam Pekan KIM Jawa Timur IX Tahun 2017 (mendapatkan penghargaan).
8. TOP IT Implementation on Open Government Smart City 2017 dalam TOP IT & TOP TELCO Award 2017 (mendapatkan penghargaan).
9. TOP Digital Transformation Readiness dalam TOP IT & TOP TELCO Award

- 2017 (mendapatkan penghargaan).
10. TOP Leader on IT Leadership 2017 dalam TOP IT & TOP TELCO Award 2017 (mendapatkan penghargaan).
 11. TOP IT Manager 2017 dalam TOP IT & TOP TELCO Award 2017 (mendapatkan penghargaan).
 12. 25 Kabupaten/Kota Gerakan Menuju 100 Smart City 2017.
 13. Juara 1 Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website) Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Anugerah Media Humas 2017.
 14. Pemerintah Kota yang telah Mengimplementasikan Smart City Nusantara dalam Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara Telkom Indonesia.

Demikianlah Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.

DOKUMENTASI



Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD setiap Hari Jum'at Pagi sampai jam 12.00 di Rumah Dinas Bupati



Rapat koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi



Revolusi Data Melalui Dasawisma seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro

- <http://www.kanalbojonegoro.com/buku-data-dasawisma-potret-jujur-profil-desa/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/melihat-potret-pkk-bojonegoro-lewat-buku-dasarwisma/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/pkk-bojonegoro-latih-kader-isi-buku-dawis-dengan-it/>
- Bojonegoro, Revolusi Data melalui Aplikasi Data Dasa Wisma
<https://www.youtube.com/watch?v=1b5FLrdWkNg>

Penguatan
Keterbukaan
Informasi Publik
dengan
Jurnalisme Komunitas
Forum Radio
Bojonegoro, Forum
KIM Bojonegoro,
BLOGGER dan
RTIK



Festival Keterbukaan Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017



Penilaian Festival Keterbukaan Pemerintah Desa Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2017 di 28 Desa/Kecamatan. Sebelumnya telah diadakan Festival Keterbukaan Pemerintah Desa oleh masing-masing Kecamatan yang penilaiannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat dan disampaikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dengan data peringkat pertama desa pada masing-masing Kecamatan. Tim Penilai Festival Keterbukaan Pemerintah Desa Tahun 2017 terdiri dari unsur SKPD dan NGO dan telah melaksanakan penilaian di 28 desa/kecamatan dengan mengacu pada Panduan Penilaian Festival Keterbukaan Pemerintah Desa yang berdasar pada Prinsip Open Government Partnership (OGP) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Inovasi serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil penilaian dan pengamatan tim yang menilai 28 Desa/Kecamatan dari 419 Desa yang peringkat pertamanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat, disepahami bahwa pada festival Keterbukaan Pemerintah Desa tahun 2017 ini terdapat tiga klasifikasi desa sebagai berikut:

- Desa terbuka dengan range nilai 76-100 sejumlah 4 desa (14%)
- Desa Menuju Terbuka dengan range nilai 51-75 sejumlah 10 desa (36%)
- Desa Kurang Terbuka dengan range nilai 25-50 sejumlah 14 desa (50%)

Terpilihnya 5 (lima) Pemerintah Desa Terbuka dan Menuju Terbuka dengan Indeks Keterbukaan tertinggi ini dapat menjadi contoh bagi desa yang lain untuk memecahkan permasalahan tata kelola desa yang belum efektif, terbuka, bebas korupsi, dan konflik menuju desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif yang berbasis Keterbukaan Informasi Publik. Kelima Desa dengan nilai Indeks Keterbukaan tertinggi hasil penilaian Festival Keterbukaan Pemerintah Desa Tahun 2017 mendapatkan Piagam Penghargaan yang diberikan pada acara Dialog Publik rutin hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017. Kelima desa tersebut adalah:

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI	KLASIFIKASI
1	MOJODESO	KAPAS	83,33	TERBUKA
2	DERU	SUMBERREJO	82,23	TERBUKA
3	SUKOHARJO	KALITIDU	79,51	TERBUKA
4	KANDANGAN	TRUCUK	77,34	TERBUKA
5	RENDENG	MALO	71,21	MENUJU TERBUKA

PENGHARGAAN

PPID AWARD 2017



Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik tingkat OPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 18 Desember 2017 di Studio JTV Surabaya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini menyampaikan, monev PPID bertujuan agar Badan Publik berbenah untuk memperbaiki PPID dan kualitas layanan informasi publik. Dari hasil monev tersebut, ternyata tahun ini menurut Ketty, mulai bermunculan Badan Publik baru yang mendapat penghargaan.

Selain itu, Ketty juga menjelaskan kategori baru yang diberikan tahun ini, yaitu Keterbukaan Informasi Desa. Penghargaan ini, merupakan tindak lanjut dari Pedoman Layanan Informasi Publik Desa P-SLIP Desa yang disusun oleh komisi Informasi pada tahun 2015 lalu. Pedoman ini, diharapkan meningkatkan layanan informasi di pemerintahan desa, mengingat selama ini, banyak Pemerintahan Desa yang disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Monev PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak bulan September hingga akhir Nopember, menilai informasi yang tersedia di website serta meja layanan informasi. Penilaian dilakukan terhadap Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur sebanyak 45 OPD, dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten Kota serta Badan Publik Pemerintahan Desa se Jawa Timur yang diusulkan oleh Kabupaten.

Dalam acara yang disiarkan oleh JTV ini, Ketty meminta para Pemenang agar terus memperbaiki kualitas layanan informasi serta menularkan ilmunya kepada Badan publik yang belum mendapat penghargaan.

Sementara itu, Ketua KI Pusat yang diwakili Arif Adi Kuswardono sebagai anggota Komisioner, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang konsisten menyelenggarakan PPID Award. Menurut Arif, keterbukaan informasi diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipasi masyarakat. "Dan yang terpenting adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera," harapnya saat memberi sambutan.

Acara yang diikuti oleh sekitar 75 undangan ini dihadiri oleh Bupati Pacitan Drs. Indartato, MM., Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, dan PPID Provinsi Jawa

Timur Ir. Eddy Santoso, MM. yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

Berikut ini daftar panerima penghargaan beberapa kategori PPID Award 2017:

1. Kab/kota Terbaik, Kategori A

- a. Kab. Blitar
- b. Kab. Pacitan
- c. Kab. Bojonegoro
- d. Kota Surabaya
- e. Kota Blitar

Kab/Kota Terbaik, Kategori B

- a. Kota Madiun
- b. Kab Ponorogo
- c. Kab Banyuwangi
- d. Kab Pamekasan
- e. Kab Jombang

2. OPD terbaik, Kategori A

- a. RSUD Dr. Saiful Anwar
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Perpustakaan & Arsip
- d. RSUD Dr. Soetomo
- e. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

OPD terbaik, Kategori B

- a. BAPERWIL – II Bojonegoro
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan
- d. Dinas Sosial
- e. Dinas Pendidikan
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. BAPERWIL – IV Pamekasan

3. Web Kab/Kota Terbaik

- a. Kab. Pacitan
- b. Kab. Bojonegoro
- c. Kab. Blitar

4. Web/Kota OPD Terbaik

- a. RSUD Dr. Saiful Anwar
- b. Dinas Sosial
- c. RSUD Dr. Soetomo

5. Meja Layanan Informasi Kab/Kota Terbaik

- a. Kab. Blitar
- b. Kota Blitar
- c. Kab. Pacitan

6. Meja Layanan Informasi OPD Terbaik

- a. Dinas Perpustakaan & Arsip
- b. RSUD Dr. Saiful Anwar
- c. Dinas Kesehatan

7. Transparansi Anggaran Kab/Kota Terbaik

- a. Kab. Pacitan
- b. Kota Madiun
- c. Kab. Bojonegoro

8. Transparansi Anggaran OPD Terbaik

- a. Dinas Kesehatan
- b. RSUD Dr. Soetomo
- c. RSUD Dr. Saiful Anwar

9. Website Desa Terbaik

- a. Desa Pejambon Bojonegoro
- b. Desa Ngumbul Kab Pacitan
- c. Desa Cerme Kabupaten Bondowoso
- d. Desa Kemloko Kab Blitar
- e. Desa Tomoyarto Kabupaten Malang
- f. Desa Alasmalang Kab Situbondo
- g. Desa Grogol Banyuwangi
- h. Desa Gemurung Sidoarjo
- i. Desa Pamolokan Sumenep

(Sumber : <http://kip.jatimprov.go.id/news/read/2017/12/18/186/ppid-award-2017-dorong-keterbukaan-informasi-hingga-ke-desa.html>)



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyabet empat penghargaan TOP-IT award 2017 yaitu TOP-IT Implementasi Open Government dan Smart City, TOP-IT Kesiapan transformasi digital, dan TOP-IT Kepemimpinan TIK (Bupati Bojonegoro Suyoto), TOP-IT Manajer bidang TIK (Kepala Dinas Kominfo)

<https://www.kanalbojonegoro.com/bojonegoro-raih-empat-penghargaan-top-it/>



Bojonegoro meraih Juara Terbaik Pertama Kategori “Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website)”, dalam Malam Anugerah Media Humas (AHM) pada Acara SAIK 2017

<http://www.suarabojonegoro.com/2017/11/bojonegoro-raih-penghargaan-terbaik.html>

Kunjungan Study Tiru

Pemkot
Banjarmasin
Studi Tiru
Penerapan
LAPOR! di
Dinas Kominfo
Bojonegoro



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kunjungan Pemkot luar Jawa yang ingin menimba ilmu dan pengalaman terkait penerapan aplikasi LAPOR!. Kali ini tim dari Subag pengelolaan dan pengaduan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berkunjung ke Dinas Kominfo di gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3, Kamis sore 19 Januari 2017. Studi tiru yang mereka lakukan dalam rangka relevansi pelaksanaan pelayanan pengaduan menggunakan program LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sesuai dengan Instruksi Menteri PAN dan RB dalam Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2015. Tamu dari Pemkot Banjarmasin tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo didampingi Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Kabid Layanan E-Government, dan Kabid TIK.

Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo menerapkan bentuk inovasi dalam pengelolaan aduan dan aspirasi masyarakat dengan cerdas, yang dinamakan SIAP LAPOR Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan + Layanan Pengaduan Online Rakyat. Semua aduan dan aspirasi masyarakat yang masuk melalui SMS pimpinan, Dialog Publik, WhatsApp, Radio, dan aplikasi LAPOR! diintegrasikan ke dalam SIAP LAPOR!.

Kusnandaka Tjatur P, selanjutnya menjelaskan bahwa inovasi SIAP LAPOR dilatar belakangi problem di Bojonegoro sebelum dan awal pemerintahan Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto), yaitu ekonomi, korupsi, dan bencana serta kondisi politik dan pemerintahan saat itu yang mana terjadi politik uang, disconnected, rendahnya kualitas infrastruktur, dan ketidakhadiran pemerintah yang semuanya

berakibat pada rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik. “Hidup hanyalah rangkaian masalah, menerima dan menemukan solusinya itulah sejatinya tugas kehidupan”, begitulah kata bijak Kang Yoto dalam menyikapi keadaan tersebut. Sejarah permasalahan masa lalu kemiskinan endemis, Keterbatasan SDM (tingkat pendidikan & kesehatan rendah, keterbatasan infrastruktur (jalan), rendahnya pelayanan pemerintah & kualitas birokrasi, keterbatasan anggaran, Kultur Negatif 6 Syetan (tidak tanggungjawab, meremehkan, menganggap hidup itu mudah, tidak sabar, iri hati, percaya gosip, suka meminta tersebut, mendorong lahirnya inovasi SIAP LAPOR untuk membangun kepercayaan publik yang sampai saat ini di Bojonegoro dapat terwujud pemerintahan yang terbuka.

Selanjutnya disampaikan tentang awal penerapan SIAP LAPOR bahwa secara kelembagaan dan SDM, Bapak Bupati Bojonegoro memerintahkan untuk membentuk Tim Kerja Bupati Bidang Percepatan dan Pengawasan Pembangunan (TKBP3) mengacu pada model UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), yang secara hukum dipayungi dalam Peraturan Bupati dan SK Bupati. Penerapan aplikasi LAPOR sendiri dimulai bulan Juni 2014 yang ditandai pula dengan penanda tanganan MOU dengan UKP4 pada pertengahan Tahun 2014. Pemkab Bojonegoro merupakan satu-satunya Kabupaten yang menerapkan aplikasi UKP4 (LAPOR, Sismon, dan Open Data) secara bersamaan. Ditambahkan pula bahwa sejak diterapkannya ketiga aplikasi UKP4 (sekarang KSP), Bapak Bupati juga memerintahkan kepada Dinas Kominfo untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaannya setiap hari jumat pagi di Rumah Dinas pada kegiatan Manajemen Review, terutama penanganan aduan dan aspirasi LAPOR. (Nuty/Dinkominfo)

Dinkominfo Kabupaten Nganjuk Studi Tiru E-Gov ke
Dinkominfo Bojonegoro



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro awal Tahun 2017 ini untuk kedua kalinya kedatangan rombongan tamu kabupaten lain yang ingin ngangsu kaweruh tentang penerapan E-Government di Bojonegoro. Setelah kedatangan rombongan tamu dari Dinas Kominfo Kabupaten Sampang pada 31 Januari 2017 lalu, kali ini Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yang berkunjung ke Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan studi tiru terkait penerapan E-Government. Rombongan berjumlah 11 orang tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro, Kamis 16 Pebruari 2017 bertempat di di ruang Kepala Dinas Kominfo, Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3. Rombongan tersebut dipimpin oleh PLT Kadin Kominfo, Kabid Layanan E-Gov, pengelola LPSE dan beberapa staf.

Sekretaris Dinas Kominfo, Ngasiaji saat penerimaan rombongan tamu menyampaikan bahwa bersamaan dengan struktur organisasi yang baru pada awal tahun 2017, Dinas Kominfo juga pindah ke gedung baru Pemkab Lantai 7. Ngasiaji berharap bahwa apa yang nantinya didapat dari studi tiru di Bojonegoro dapat diterapkan dan dikembangkan di Kabupaten Nganjuk.

PLT Kadin Kominfo Kab. Nganjuk, Gondo Hariyono pada kesempatan berikutnya menyampaikan terima kasih atas penerimaan ke Bojonegoro dan juga berharap dapat meniru semua inovasi-inovasi terutama dalam bidang teknologi informasi untuk dikembangkan di Kabupaten Nganjuk. Gondo Hariyono juga menyampaikan beberapa kendala setelah dibentuknya Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk pada akhir 2016, belum dapat menentukan harus memulai dari mana untuk dapat menjalankan tupoksi secara optimal, sehingga merasa bahwa dalam 1 bulan ini belum ada progres kinerja. Gondo Haryono menjelaskan tujuan utamanya untuk mencari informasi, referensi dan masukan serta apa yang harus dilakukan, karena dalam semester I tahun 2017 akan mengadakan perangkat e-gov, yang mana pada tribulan I akan membangun infrastruktur dan pada tribulan II akan pengadaan alat dan sebagainya. Harapanya dengan belajar dari Bojonegoro, apa yang telah tertuang dalam DPA dapat dilaksanakan dengan baik, optimal dan sesuai ketentuan.

Selanjutnya Kabid Layanan E-Government, Alit Saksama Purna Yoga menyampaikan paparan terkait sejarah penerapan E-Government di Bojonegoro. Awal paparan disampaikan struktur organisasi sebelum tahun 2017 dan sesudah tahun 2017, yang mana pada tahun 2017 ini sebagai Dinas bertipe A terdiri dari Sekretariat, 4

Bidang, dan 1 UPTD Radio Malowopati. Untuk bidang terdiri dari Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Bidang Layanan E-Government (E-Gov). Secara khusus Alit Saksama menyampaikan bahwa pada OPD baru 2017, untuk urusan komunikasi dan informasi ditangani oleh Bidang PKP dan PIAP dan urusan teknologi informasi ditangani oleh Bidang TIK dan E-Gov.

Berikutnya Alit Saksama menjelaskan sejarah pembangunan infrastruktur TIK di Bojonegoro yang diawali pada tahun 2010 dengan pembangunan NOC dan koneksi jaringan FO dari NOC ke lingkup Setda, rumah dinas dan 6 SKPD dengan bandwidth internet 20 MBps. Pada tahun 2011 dilakukan pengembangan koneksi menjadi 13 SKPD, 2 CCTV, IP Phone 20 unit, 10 titik hotspot, dan bandwidth internet 35 MBps. Pada tahun 2012 dan 2013 bandwidth internet naik menjadi 50 MBps. Pada tahun 2014 dilaksanakan pembangunan tower internet di 3 desa, penyebaran wifi ID Telkom, pembangunan data center, dan BLC untuk 3 desa dari Telkom. Pada tahun 2015-2016 dilakukan penyusunan Masterplan Jaringan Pemkab-Kec-Desa, pembangunan jaringan di gedung baru pemkab, pembangunan Data Center dan NOC ISO 27001 (gedung baru), pembangunan jaringan RSUD, pembangunan backbone jaringan kecamatan, Bandwidth 130 Mbps, pembangunan Kampung Digital UKM dan launching website Desa, pembangunan Big Data Kabupaten Bojonegoro.

Alit Saksama juga menambahkan bahwa terkait open government di Bojonegoro telah dimulai sejak tahun 2008 awal kepemimpinan Bupati Drs. H. Suyoto, M.Si yang mana semua warga masyarakat dari golongan apapun, dengan kondisi apapun dapat menyampaikan aduan dan aspirasinya setiap hari jum'at mulai jam 13.30 di pendopo Pemkab melalui Dialog Interaktif, sampai saat ini. "Adalah hal biasa, warga dapat menghujat Bupati dan kepada SKPD melalui Dialog Publik" begitu ditegaskan oleh Alit. Berikutnya Alit menambahkan bahwa pengelolaan aduan dan aspirasi berkembang dengan menggunakan IT yang mana pada tahun 2014 diterapkan SIAP LAPOR. Mulai pertengahan 2014, Bojonegoro mengadopsi aplikasi LAPOR! UKP4 untuk pengelolaan aduan dan aspirasi masyarakat, bahkan Pemkab Bojonegoro juga menerapkan 2 aplikasi UKP4 lainnya yaitu Sismon dan Open Data. Kesemua aplikasi itu setiap jum'at pagi dilaporkan penerapan dan perkembangannya pada kegiatan evaluasi kinerja di rumah dinas Bupati. Alit juga menjelaskan bahwa aplikasi yang diterapkan di Bojonegoro sampai pada tahun 2016 terdapat hal yang menonjol yaitu inputting data dasa wisma oleh kader PKK desa ke dalam aplikasi Dasa Wisma dan pada tahun 2017 dikembangkan aplikasi open data kontrak.

Rombongan Dinas Kominfo Nganjuk juga berkesempatan melihat tower utama di lantai 8 gedung Pemkab Bojonegoro untuk koneksi ke 28 kecamatan dan mengunjungi data center Pemkab Bojonegoro di lantai 4 yang kesemuanya dibangun pada akhir tahun 2016. Rombongan juga mendapatkan penjelasan singkat terkait perencanaan, spesifikasi dan kisaran biaya yang dibelanjakan untuk pembangunan data center yang berstandar ISO tersebut. (Nuty/Dinkominfo)

Kadin Kominfo paparkan pengelolaan IKP pada Studi Tiru
Pemkab Tuban



Pemkab Bojonegoro, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika kembali kedatangan tamu studi tiru dari Kabupaten lain. Setelah menerima rombongan tamu dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk 16 Pebruari 2017 dan Dinas Kominfo Kota Bekasi 22 Maret 2017 lalu dengan tujuan studi tiru terkait pengelolaan TIK di Bojonegoro, kali ini dari Dinas Kominfo dan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tuban berkunjung ke Pemkab Bojonegoro. Rombongan berjumlah 9 orang tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Yayan Rohman, AP, MM didampingi Kadin Kominfo, Kabag Ortala Setda, Kabag Humas dan Protokol Setda serta Kabid dan Kasi dari Dinas Kominfo, di Ruang co-creating gedung Pemkab Bojonegoro lantai 2, Senin 27 Maret 2017.

Kadin Kominfo Kusnandaka Tjatur P menyampaikan beberapa hal kepada jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Tuban terkait peran masing-masing bidang dan seksi pada struktur organisasi Dinas Kominfo. Salah satunya adalah terkait data-data Pemkab Bojonegoro yang mana memerlukan survey dan kemudian diolah menjadi data PDRB, data IPM dan lain-lain yang dahulu dikelola oleh BAPPEDA, sekarang ditangani oleh Kominfo. Bahwa disamping data-data statistik maka Pemkab harus memiliki data dasar, yang mana di Bojonegoro terdapat kegiatan besar yaitu revolusi data yang bekerjasama dengan PKK untuk inputing data dasar yang meliputi 300 kolom indikator data dan apabila semua data tersebut di-mix akan menjadi suatu informasi penting, dan hal itu pengelolaannya di Kominfo. Jadi jika pada Bagian Humas dan Protokol mengelola terkait kegiatan-kegiatan pimpinan daerah, maka Kominfo mengelola informasi dan komunikasi (IKP) seluruh OPD. Oleh karena itu di Bojonegoro untuk IKP dipilah dua yaitu Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik yang didalamnya ada Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik (menangani KIM, media center, dan website). Jadi berbicara tentang Kominfo, komunikasi ada empat unsur, maka IT juga ada empat unsur yaitu infrastruktur, aplikasi, data dan tata kelola/SDM.

Kusnandaka Tjatur memberikan perumpamaan bahwa infrastruktur adalah jalan tol, jalan tol tidak akan berguna jika tidak ada kendaraan yaitu aplikasi. Kendaraan bisa motor, carry, mercy dan pengendaranya harus mampu mengoperasikan jenis-jenis kendaraan tersebut. Kendaraan akan tidak terpakai jika tidak ada penumpang, maka diperlukan data sebagai penumpangnya. Kendaraan yang berjalan di jalan tol tadi akan resiko bertabrakan jika tidak ada rambu-rambu, maka dari itu diperlukan tata kelola.

Bagaimana suatu OPD membuat aplikasi dan data harus bisa saling menukar dan hal ini harus ada tata kelolanya. Maka dari itu aplikasi yang dibangun antar OPD harus open source, harus bisa di-inter operabilitaskan, tidak boleh sendiri-sendiri. Kusnandaka juga menyampaikan bahwa Bojonegoro juga telah menetapkan Perbup tentang Tata Kelola Informasi Desa pada tahun 2017 yang mana pengelolaan informasi desa, admin desa, web desa, domain desa, hosting desa penganggarannya bisa di desa.

Selanjutnya Kusnandaka menjelaskan tentang Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik yang di dalamnya terdapat seksi pelayanan informasi publik yang tugas utama mengelola terkait undang-undang KIP, seksi pengelolaan informasi publik yang mengelola dialog interaktif dan informasi-informasi yang dishare dengan Bagian Humas, serta seksi yang terpenting yaitu seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik yang harus mengolah berbagai informasi menjadi informasi baru, yang jika hal ini tidak dilakukan maka semua informasi dari berbagai sumber tersebut tidak akan bermanfaat. Sebagai contoh adalah pengelolaan aduan melalui LAPOR dan radio malowopati yang bahkan saat ini Dinas Kominfo diperintah oleh Bupati Bojonegoro untuk membentuk Unit Reaksi Cepat Penanganan Aduan melalui radio malowopati. Bahwa aduan dan aspirasi tersebut diidentifikasi dan diolah sehingga persoalan-persoalan yang paling banyak muncul dijadikan topik pembahasan di radio yaitu dengan mengundang OPD pada program radio Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) dan pada Dialog Interaktif, sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan dan pemberdayaan. Dari sini Kominfo mengarahkan bagaimana money follow problem di dalam e-planning dan e-budgeting. Pada saat penyusunan anggaran Dinas Kominfo memberikan masukan pada pimpinan tentang persoalan-persoalan yang paling menonjol dan harus ditangani oleh OPD melalui kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Melalui aplikasi Sispan, setiap tiga bulan OPD dievaluasi capaian targetnya. Berikutnya terkait pengelolaan media center karena tenaga terbatas maka bekerja sama dengan jurnalis-jurnalis yang ada di Bojonegoro melalui sistem kontrak tahunan.

Pada akhir kunjungan rombongan Dinas Kominfo dan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tuban juga berkesempatan melihat tower utama di lantai 8 gedung Pemkab Bojonegoro untuk koneksi ke 28 kecamatan dan mengunjungi media center Dinas Kominfo di kompleks Radio Malowopati. (Nuty/Dinkominfo)

Kota Lubuklinggau, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Ngawi
Studi Tiru Bersama ke Pemkab Bojonegoro



Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro untuk kesekian kalinya menjadi rujukan dan tujuan studi tiru bagi Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota lain. Kali ini benar-benar berbeda, 3 Dinas Kominfo dari Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, Kabupaten Bangkalan Madura, dan Kabupaten Ngawi dalam hari yang bersamaan berkunjung ke Pemkab Bojonegoro dengan tujuan untuk belajar dan meniru tentang penerapan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro terutama dalam hal komunikasi, teknologi informasi dan e-government. Rombongan tamu tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda (Asisten I), Djoko Lukito, S.Sos, MM di ruang Co Creating gedung Pemkab Bojonegoro lantai 2. Selain Asisten I dan Kepala Dinas Kominfo sebagai narasumber, dari Pemkab Bojonegoro hadir Kabag Pemerintahan, Sekretaris BAPPEDA, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabag Hukum dan Per-UU, Kasubag dari Bagian Umum dan Keuangan, serta Kasubag dari BPKAD. Rombongan dari Kota Lubuklinggau dipimpin oleh Asisten I dan Kadin Kominfo beserta jajaran serta 1 camat, sedangkan dari Kabupaten Bangkalan dan Ngawi dihadiri oleh Kadin kominfo masing-masing beserta jajarannya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Djoko Lukito, S.Sos MM dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi atas kehadiran ketiga tamu kota dan kabupaten tersebut dalam rangka belajar bersama dengan Pemkab Bojonegoro khususnya dalam pelaksanaa e-gov. "Bahwa apa-apa yang telah dilaksanakan Pemkab Bojonegoro terkait hal tersebut dapat disharingkan dan dipelajari bersama, bukan berarti Pemkab Bojonegoro lebih baik namun karena sejak tahun kemarin Bojonegoro menjadi percontohan tingkat internasional dalam Open Government Partnership, Hal ini yang

mendorong Kabupaten Bojonegoro untuk terus berbenah menjadi lebih baik dan terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan”, demikian ungkap Djoko Lukito.

Selanjutnya Djoko Lukito menjelaskan gambaran singkat tentang Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Kabupaten Blora, Tuban, Lamongan, Nganjuk, sebagian Madiun, sebagian Jombang, dan sedikit Ngawi, dengan luas wilayah 235.000 Ha yang mana 40% adalah wilayah hutan negara, 32,58% lahan sawah, 22,42% adalah tanah kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain. Dan untuk wilayah administrasi terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa 11 Kelurahan. Bahwa terkait dengan pemerintahan desa, Pemkab Bojonegoro juga berupaya untuk terbuka mulai dari pemerintah desa sampai kabupaten, yang mana mulai tahun kemarin untuk APBDes sebagian juga sudah dipublish di website Pemdes dan bagi desa yang masih belum memiliki web desa, untuk APBDes dipampang dalam sebuah banner besar yang mudah dilihat sehingga masyarakat tahu kekuatan APBDes dan digunakan untuk apa. Dan untuk OPD di Pemkab Bojonegoro, sejak tahun kemarin juga melakukan hal serupa yang ditempelkan di lingkup gedung Pemkab Bojonegoro 7 lantai, berupa banner anggaran OPD dan penggunaannya.

Dijelaskan pula karakteristik Bojonegoro yang setiap musim kemarau mengalami kekeringan dan saat musim penghujan mengalami banjir yang sejak bulan Nopember 2016 kemarin sampai saat ini masih terus terjadi banjir karena dilalui Bengawan Solo dan sebagai hilir, sehingga mau tidak mau meski tidak hujan akan mengalami kondisi siaga banjir. Tanah di Bojonegoro juga labil sehingga dilakukan pavingisasi, untuk mengatasi kekurangan air saat kemarau dengan memanfaatkan sebesar-besarnya Bengawan Solo dengan dibangunnya bendung gerak, 500-an embung-embung, dan cek dam di sungai-sungai. Dalam hal peningkatan SDM, untuk meningkatkan APK kebijakan Pemkab Bojonegoro mulai tahun 2015 adalah pemberian subsidi pada siswa, yang mana pada tahun 2016 masing-masing anak SLTA mendapat bantuan subsidi 2 juta per tahun, dan tahun 2017 ini hal tersebut dilakukan evaluasi, akan ada klasifikasi lebih khusus dengan nilai bervariasi dalam pemberian subsidi tersebut. Djoko Lukito juga menjelaskan bahwa Bojonegoro menyumbang 25% produksi minyak nasional namun pada kenyataannya pendapatan dari minyak tidak bisa diharapkan karena sangat fluktuatif, tidak bisa menjanjikan seperti tahun 2016 lalu terjadi revisi-revisi pengurangan. Terkait dengan keterbukaan, juga dijelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro telah memulainya sejak tahun 2008 melalui Dialog Publik dan pada tahun 2017 ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Open Data Kontrak, yang tahun ini dikembangkan aplikasinya.

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P dalam paparannya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro mengalir pada suatu proses, jadi Dinas Kominfo Bojonegoro juga belajar banyak hal bahwa ada suatu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana tidak hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional namun bagaimana melakukan pelayanan yang tepat, cepat, dan bermanfaat. Tepat dalam memberikan pelayanan, cepatnya adalah dalam waktu terefektif-terefisien, manfaatnya adalah bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi karakteristik masing-masing daerah yang pasti berbeda-beda. Sebagai contoh saat Dinas Kominfo belajar ke Surabaya, DKI Jakarta, Jogjakarta dan Bandung ternyata tidak begitu leading bisa berjalan, setelah dibedah ternyata kondisi lingkungan berbeda. Jika berbicara tentang e-gov tidak bisa dipersandingkan apalagi dipertandingkan, tetapi yang paling urgen adalah tantangan apa yang dihadapi daerah, dan bagaimana kondisi daerah. Di kota-kota besar tersebut pengembangan e-gov sudah tidak berfikir lagi tentang smart people karena secara budaya telah terbentuk, namun untuk Bojonegoro yang 40% wilayah hutan, sekitar 20% merupakan kantong-kantong kemiskinan, awal tahun 2010 saat pengembangan infrastruktur IT, tanggapan legislatif kurang mendukung, ini menandakan bahwa mindset tentang pengembangan IT tidak semuanya bisa diterima.

Kusnandaka Tjatur P juga menjelaskan sejarah pembangunan infrastruktur TIK di Bojonegoro yang diawali pada tahun 2010 dengan pembangunan NOC dan koneksi jaringan FO dari NOC ke lingkup Setda, rumah dinas dan 6 SKPD dengan bandwidth internet 20 MBps. Pada tahun 2011 dilakukan pengembangan koneksi menjadi 13 SKPD, 2 CCTV, IP Phone 20 unit, 10 titik hotspot, dan bandwidth internet 35 MBps. Pada tahun 2012 dan 2013 bandwidth internet naik menjadi 50 MBps. Pada tahun 2014 dilaksanakan pembangunan tower internet di 3 desa, penyebaran wifi ID Telkom, pembangunan data center, dan BLC untuk 3 desa dari Telkom. Pada tahun 2015-2016 dilakukan penyusunan Masterplan Jaringan Pemkab-Kec-Desa, pembangunan jaringan di gedung baru pemkab, pembangunan Data Center dan NOC ISO 27001 (gedung baru), pembangunan jaringan RSUD, pembangunan backbone jaringan kecamatan dan tower induk koneksi kecamatan dengan total bandwidth 130 Mbps.

Berikutnya Kusnandaka Tjatur P menyampaikan proses Bojonegoro menjadi open government yang telah dimulai sejak tahun 2008 melalui Dialog Publik setiap jumat siang bertempat di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro dan pada tahun 2014 dilaksanakan rapat evaluasi kinerja di rumah dinas Bupati Bojonegoro setiap Jumat pagi. Dijelaskan pula bahwa proses pemerintahan terbuka Kab. Bojonegoro terdapat 3 hal besar yang diterapkan yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Kolaborasi, yang melalui proses individual, institusional, dan kultural, dari Selfish (ego) menjadi service (eco). Proses panjang menuju OGP dimulai Tahun 2008-2010 dengan penerapan dialog publik, anjangsana, sms, facebook. Tahun 2010-2012 ditambah media radio, media cetak, kotak aduan, tahun 2013 terbit Perbup 30 tahun 2013 tentang MIPBPP. Tahun 2014 mulai menerapkan aplikasi UKP4 (KSP) yaitu LAPOR, Sismon, Open Data dan terbit Perbup Nomor 42 Tahun 2014 tentang TKBP3 dan juga inovasi penerapan SIAP-LAPOR. Tahun 2015 peningkatan keterbukaan melalui web bojonegoro, PPID, info harga, transparansi anggaran, evaluasi kinerja. Pada tahun 2016 terbit Perbup Nomor 12 tahun 2016 tentang KAK Perencanaan, dan tahun 2017 terbit Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Open Data Kontrak. Kusnandaka Tjatur kembali menambahkan bahwa Dinas Kominfo setiap hari jumat pagi pada kegiatan manajemen reu di rumah dinas bertugas melaporkan evaluasi LAPOR dan SISPAN kepada Bupati Bojonegoro. Bahwa semua masukan pada manajemen reu tersebut menjadi inputing para OPD baik untuk perencanaan anggaran, pengawasan, evaluasi dan inputing bagi penyusunan anggaran Pemkab Bojonegoro. (Nuty/Dinkominfo)

**Kominfo Kabupaten Ponorogo dalam Aplikasi LAPOR! dan
Informasi Harga di Kominfo Bojonegoro**



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kembali dikunjungi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Selasa 4 April 2017. Rombongan berjumlah 9 orang tersebut diterima oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kominfo di ruang Kepala Dinas, Gedung Pemkab Lantai 3 dihadiri dari Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, Kecamatan Bojonegoro.

Sekretaris Dinas Kominfo, Ngasiaji menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan di Bojonegoro sejak tahun 2016 diantaranya keterbukaan pemerintahan desa (OGP Desa) yang mana semua Desa harus mempublikasikan semua anggaran (APBDES) melalui sarana banner dan website desa. Banner tersebut memuat semua anggaran desa yang tercantum dalam APBDES dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus dipasang di depan balai desa dan tempat-tempat strategis. Selain itu juga harus diupload di website desa yang perkembangannya saat ini untuk website desa belum semua memiliki dan tahun 2017 ini ditargetkan semua desa memiliki webdes.

Ngasiaji juga menyampaikan kegiatan-kegiatan unggulan Dinas Kominfo sampai saat ini seperti Dialog Interaktif yang mana semua kalangan masyarakat dari strata apapun dapat ikut untuk menyampaikan aduan ataupun aspirasi. Dinas Kominfo juga melakukan analisa tema aduan yang paling banyak disampaikan masyarakat dan atas dasar itu Dinas Kominfo mendatangkan narasumber dari OPD, BUMD, instansi lain luar Pemkab pada Dialog Interaktif dan sebagai narasumber pada program unggulan Radio Malowopati "Ayo Mas Bro".

Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab Ponorogo Winarko Arif Tjahjono menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ngasiaji, menjelaskan bahwa secara khusus kedatangan mereka adalah dalam rangka mendalami proses-proses penerapan aplikasi LAPOR, info harga bahan pokok, dan sistem monitoring yang telah lebih dahulu diterapkan oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo mulai dari proses perencanaan, proses-proses administrasi dengan KSP, pelaksanaan di lapangan oleh OPD sampai pada tahap evaluasi.

Selanjutnya Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kab Ponorogo, Wiwik Dyah Pratiwi menyampaikan bahwa hasil kunjungan tahun 2016 lalu ke Bojonegoro telah dilaporkan kepada Bupati Ponorogo, namun disposisi yang turun adalah baru persetujuan dari Sekda Ponorogo. Pihaknya pada awal tahun 2017 melakukan koordinasi ke KSP tentang prosedur-prosedur untuk dapat menerapkan aplikasi LAPOR dan SISPAN. Saat itu dari pihak KSP

menyampaikan agar Bupati Ponorogo mengirimkan surat permohonan kepada deputi KSP untuk menerapkan aplikasi tersebut dan ditindaklanjuti dalam bentuk MOU. Pihak KSP menjelaskan untuk pelaksanaan bimtek agar Pemkab Ponorogo menyiapkan akomodasi perjalanan dinas, honor narasumber, dan penginapan untuk tiga - enam narasumber dari KSP. Namun hingga saat ini pihaknya belum menindaklanjuti hal-hal tersebut karena terdapat keraguan belum mendapat disposisi langsung dari Bupati Ponorogo.

Menanggapi berbagai hal yang telah dibahas, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Bojonegoro Djoko Suharmanto menegaskan sangat pentingnya komitmen Pimpinan (Bupati) untuk suksesnya penerapan LAPOR dan SISPAN. Djoko Suharmanto menyarankan agar Kadin Kominfo dan Statistik Kab Ponorogo segera menghadap ke Sekda Ponorogo sehingga terdapat kepastian disposisi Bupati Ponorogo atas rencana penerapan LAPOR dan SISPAN. Djoko Suharmanto menyarankan agar secara bertahap mengimplementasikan LAPOR terlebih dahulu karena manfaatnya lebih langsung ke masyarakat Ponorogo, dan pihak Dinas Kominfo Bojonegoro siap untuk mendampingi mulai dari sosialisasi, pelaksanaan bimtek, dan penerapan LAPOR di Ponorogo. Namun hal yang paling penting adalah pihak Pemkab Ponorogo harus mendapatkan username dan password administrator dan pejabat penghubung terlebih dahulu dari KSP.

Mendapatkan penjelasan singkat Dinas Kominfo Bojonegoro tentang penerapan SISPAN di Bojonegoro, Kabid Statistik dan Persandian, Yuli Astuti meminta agar dapat diberikan penjelasan secara rinci tahapan-tahapan koordinasi dengan KSP, proses perencanaan, pelaksanaan, kendala, dan evaluasi penerapan SISPAN di Pemkab Bojonegoro. Terkait hal ini Djoko Suharmanto memberikan contoh pada rencana aksi bidang Pengelolaan Komunikasi Publik tentang PPID, yang masuk dalam sistem SISPAN. Djoko Suharmanto menyarankan agar rencana aksi yang dimasukkan dalam SISPAN benar-benar prioritas dan paling memiliki peran besar pada pencapaian RPJMD Kab. Bojonegoro. Dirinya juga menyarankan agar ukuran keberhasilan dan data dukung yang dipilih untuk dimasukkan dalam SISPAN saat B03, B06, B09, B12 jangan yang terlalu berat, tidak dapat dipenuhi dan dapat berakibat warna merah pada SISPAN.

Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab Ponorogo juga menyampaikan keinginan kuatnya untuk dapat menggunakan aplikasi informasi harga bahan pokok dan informasi produk IKM yang dimiliki Pemkab Bojonegoro yang saat ini dikelola oleh Dinas Perdagangan Kab Bojonegoro. Pengelola aplikasi informasi harga bahan pokok dari Dinas Perdagangan Kab Bojonegoro menjelaskan secara langsung penerapan aplikasi tersebut melalui website informasi harga yang mencakup update data harga oleh semua admin dari 28 kecamatan pada aplikasi, berdasarkan hasil survey harga yang dilakukan oleh petugas kecamatan 2-3 kali setiap minggu. Dijelaskan pula bahwa aplikasi sangat bermanfaat untuk memantau kenaikan dan penurunan harga di semua pasar kecamatan, dan akan memberikan peringatan melalui sms ke Bupati dan Forpimda jika terjadi perubahan harga 5%. Menjawab niat kuat Pemkab Ponorogo untuk dapat menerapkan aplikasi informasi harga, Pemkab Bojonegoro menyatakan kesiapan untuk berbagi aplikasi tersebut dengan Pemkab Ponorogo. (Nuty/Dinkominfo)



Dinkominfo Kota
Malang belajar
Bidang Statistik ke
Dinkominfo
Bojonegoro

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai Dinas tipe A yang lebih dahulu eksis menangani urusan komunikasi dan informatika untuk kesekian kalinya kembali menerima tamu dari Dinas Kominfo daerah lain sebagai rujukan untuk menimba ilmu. Kamis, 13 April 2017 Dinas Kominfo Kota Malang berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro untuk koordinasi dan konsultasi dalam rangka kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral di Dinas Kominfo Kota Malang tahun anggaran 2017. Rombongan yang terdiri dari Kabid Statistik, Kasi Pengelolaan Data Statistik, Kasi Evaluasi dan Pelaporan, dan Kasi Layanan Data dan Informasi diterima oleh Kadin dan Sekdin Kominfo serta beberapa staf di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo.

Sekretaris Dinas Kominfo Ngasiaji saat menerima rombongan tamu Dinas Kominfo Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih sekaligus merasa heran karena Kota Malang yang terkenal maju dalam bidang IT malah ingin menimba ilmu di Bojonegoro. Ngasiaji menyampaikan bahwa perjalanan keterbukaan Pemkab Bojonegoro telah dimulai sejak tahun 2008 sejak Bupati Bojonegoro (Kang Yoto) dilantik. Kang Yoto sejak saat itu menerima berbagai kalangan dengan latar belakang apapun datang ke pendopo Malowopati untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aduan melalui Dialog Publik setiap hari jumat siang jam 13.30 - 16.00 WIB, yang juga harus dihadiri oleh Kepala SKPD. Saat itu juga dimulai membuka saluran SMS dan facebook pimpinan sebagai sarana rakyat Bojonegoro untuk menyampaikan aduan maupun aspirasi, sampai pada akhirnya Bojonegoro menerapkan aplikasi LAPOR. Bahkan saat ini Kang Yoto telah meresmikan Unit Respon Cepat penanganan aduan rakyat melalui radio Malowopati FM yang mana semua aduan akan diterima oleh penyiar untuk disiarkan langsung melalui radio, kemudian dimasukkan dalam sistem LAPOR, dan juga melalui jalur WhatsApp dan Instagram sehingga Kepala OPD beserta anggotanya dapat cepat menanggapi aduan rakyat.

Kabid Statistik Dinas Kominfo Kota Malang Drs. Sukaryono menjelaskan secara struktur organisasi memiliki 4 bidang yaitu Bidang Informasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Persandian. Sukaryono menyampaikan awalnya ngangsu kaweruh ke Dinas Kominfo Kota Bandung, dan disana justru mendapatkan informasi kalau Bojonegoro dan Bandung pernah belajar bersama di Kantor Staf Presiden (saat itu UKP4) tentang LAPOR. Pihak Kominfo Kota Bandung mengatakan bahwa Bupati Bojonegoro dan Kadin Kominfo nya bahkan pernah paparan di Paris, hal inilah yang akhirnya juga

mendorong Kominfo Kota Malang, khususnya Bidang Statistik untuk belajar ke Bojonegoro.

Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P selanjutnya menyampaikan berbagai hal tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Bojonegoro. Kusnandaka menyampaikan rasa kagetnya karena Dinas Kominfo dari Kota Malang justru malah ingin belajar dari Bojonegoro. Dirinya mengakui bahwa awal-awal menjalani tugas sebagai Kepala Dinas Kominfo belajar banyak salah satunya dari Kota Malang. "Malang adalah guru saya", demikian ujar Kusnandaka.

"Masing-masing kita punya masalah sesuai dengan tantangan ke-sejarah-an masing-masing" ungkap Kusnandaka. Malang secara budaya masyarakatnya telah benar-benar melek IT, infrastruktur IT sudah terbangun baik, memiliki SDM IT yang memadai, memiliki perguruan tinggi bidang IT. Hal ini berbeda jauh dengan Bojonegoro yang rata-rata masih belum melek IT karena mayoritas tinggal jauh dari fasilitas-fasilitas IT, IT bukan hal yang penting, Bojonegoro terkenal dengan sejarah panjangnya sebagai daerah miskin, jika musim hujan banjir, jika musim kering mengalami kekeringan, tanah gerak, SDM IT sangat terbatas.

Dengan segala keterbatasan itu maka langkah yang ditempuh adalah membuat KIM berbasis IT, menggandeng RTIK/Blogger, Kolaborasi dengan NGO, Kolaborasi lembaga/instansi SMK Jurusan IT dan AKN, dan Gerakan PKK dan Desa. Semua hal tersebut akan memiliki keberlanjutan, kuncinya pada komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan (Kang Yoto) diantaranya telah dibuktikan melalui Dialog Publik setiap jumat siang dari tahun 2008 sampai saat ini, selain itu manajemen review setiap jumat pagi di rumah Dinas Bupati untuk mengevaluasi capaian target kerja semua OPD sekaligus evaluasi penanganan aduan melalui LAPOR dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SISPAK setiap tribulan.

Selanjutnya dalam bidang statistik Kusnandaka menjelaskan bahwa meskipun bidang statistik secara tugas dan fungsi sudah pindah ke Dinas Kominfo namun untuk data statistik sektoral masih ditangani oleh BAPPEDA yang masih berhubungan langsung dengan BPS dan rencananya tahun depan baru akan dikelola secara penuh oleh Dinas Kominfo. Saat ini yang paling utama dikerjakan oleh Dinas Kominfo adalah penyusunan base data (data dasar) Bojonegoro yang awalnya digagas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Ibu Mahfudhoh Suyoto) melalui inputing data dari buku data wisma kedalam aplikasi data Dasa Wisma. Hal ini merupakan kerjasama dengan PKK dan juga pekerjaan besar yang melibatkan kader PKK desa untuk menginputkan data dasawisma yang memiliki 300 kolom per KK. Kusnandaka menjelaskan bahwa melalui data dasawisma dengan berbagai indikatornya akan dapat menjawab kebutuhan pengolahan menjadi data statistik sektoral. (Nuty/Dinkominfo)



Dinas Kominsta
Kota Magelang
Belajar OGP, KIM,
dan PPD
ke Bojonegoro

Hasil Kerja Tepat, Cepat, Bermanfaat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama seluruh masyarakat Bojonegoro selama ini terus menarik perhatian Pemkab dan Pemkot dari Provinsi lain untuk menjadikannya rujukan kunjungan kerja, studi tiru, dan benchmarking. Kali ini Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jateng berkunjung ke Pemkab Bojonegoro untuk studi banding terkait proses pembentukan unit kerja Keimigrasian di Bojonegoro, serta dari Dinas Komunikasi Informatika yang secara khusus dalam rangka benchmarking terkait pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) dan pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Rombongan Pemkot Magelang yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Magelang Drs. Indra Indah Wacana diterima oleh Wakil Bupati Bojonegoro Drs. H. Setyo Hartono, MM didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman, AP, MM di ruang Angling Darmo, Selasa 19 September 2017. Beberapa perwakilan SKPD yang hadir diantaranya dari BAPPEDA, Dinas Kominfo, Bagian Pemerintahan serta Bagian Humas dan Protokol.

Wakil Bupati Bojonegoro Drs. H. Setyo Hartono, MM dalam sambutan penerimaan kunjungan kerja tersebut menyampaikan bahwa Bojonegoro merupakan daerah perbatasan yang paling ujung barat. Bojonegoro juga memiliki permasalahan dan juga keterbatasan yang harus kita hadapi, Kita tidak boleh menyerah, keterbatasan harus melawannya. Pembentukan kantor imigrasi merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Bojonegoro kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam hal ini pelayanan pembuatan paspor. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam membuat paspor.

Indra Indah Wacana menyampaikan bahwa Pemkot Magelang ingin belajar bersama dengan Pemkab Bojonegoro atas keberhasilannya membuat kesepakatan (MoU) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 19 Mei 2017 lalu. Pihaknya ingin mempelajari apa saja konten dan isi dari MoU antara Ditjen Imigrasi Kemenkumham dengan Pemkab Bojonegoro. Seperti telah disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto, M.Si saat penandatanganan MoU tersebut beberapa bulan lalu, jika Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak berhasil diwujudkan di

Bojonegoro dalam waktu yang singkat, maka masyarakat Bojonegoro dan Kabupaten sekitarnya bisa segera mendapat layanan keimigrasian. Tugas kantor keimigrasian nantinya diharapkan selain mengurus pembuatan paspor, juga melakukan pelayanan keimigrasian untuk orang asing, diantaranya, kepengurusan visa, ijin tinggal, keperluannya di Indonesia dan sebagainya. Tugas lainnya adalah pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Setelah penerimaan oleh Drs. H. Setyo Hartono, MM selanjutnya secara khusus rombongan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang menerima penjelasan terkait penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dalam meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di ruang Batik Madrim Pemkab Bojonegoro.

Sharing informasi dan diskusi yang dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Dinas Kominfo Bojonegoro, Djoko Suharmanto didampingi kasi dan staf berlangsung cukup interaktif. Diskominsta Kota Magelang tertarik dengan proses hingga KIM memiliki peran penting sebagai media masyarakat terutama di tingkat pemerintahan desa serta keterbukaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro sampai tingkat desa. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsta Magelang menyampaikan apresiasinya terhadap keberhasilan Dinas Kominfo Bojonegoro dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk masyarakat melalui peranan KIM berbasis IT. Dia juga menyampaikan bahwa selain dua hal tersebut juga ingin ngangsu kaweruh tentang pengelolaan LPPL dan PPID. "Kami selama ini mengetahui keberhasilan-keberhasilan Bojonegoro melalui internet, dan memang kami tidak salah telah memilih Bojonegoro sebagai rujukan belajar bersama", tuturnya

Dalam awal penjelasannya Djoko Suharmanto menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Bojonegoro dengan tipe A memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, dan Bidang Layanan E-Government. Djoko Suharmanto juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang membuat Bojonegoro begitu dikenal karena pelaksanaan Dialog Interaktif setiap Jumat siang.

Djoko Suharmanto menyampaikan proses perjalanan KIM di Bojonegoro yang dulunya adalah Kelompencapir (saat masih dibawah Departemen Penerangan) dan sejak sekitar 4 tahun lalu telah dirubah menjadi KIM yang berbasis IT. "Bojonegoro melalui Dinas Kominfo merupakan Kabupaten yang mengawali perubahan tersebut" tutur Djoko Suharmanto.

Djoko Suharmanto menjelaskan pentingnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa di tingkat Desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mana dalam hal keterbukaan pemerintahan desa maka di desa harus ada PPID. KIM yang sudah ada juga dilakukan penguatan.

Terkait PPID di Bojonegoro telah ada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017, hal ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menganggarkan PPID. Djoko Suharmanto juga menambahkan bahwa sekitar 25% dari 419 desa di Bojonegoro saat ini telah memiliki PPID, yang mana hal ini merupakan unggulan Pemkab Bojonegoro untuk PPID Award Tahun 2017. Tahun 2016 lalu pun telah dilaksanakan festival OGP tingkat pemerintahan desa, diantaranya dengan publikasi semua APBDes melalui baliho, dan juga diunggah di website desa.id. Bojonegoro juga telah memiliki indikator keterbukaan pemerintahan desa yang terdiri dari 4 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, peran masyarakat dan inovasi.

Terkait pelaksanaan OGP di Bojonegoro, rombongan tamu juga diajak melihat banner-banner keterbukaan anggaran SKPD di lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro dan melihat secara langsung pelaksanaan tugas-tugas Bidang PKP dan PIAP di

lingkup Dinas Kominfo Lantai 3. Mereka juga melihat secara langsung dan menerima penjelasan bagaimana proses berjalannya pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Forum KIM Kabupaten Bojonegoro, Sufyan yang sehari-hari bertugas sebagai Sekretaris Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo dan Ketua KIM Deru Maju Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Iwan Siswoyo juga ikut hadir untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan KIM.

Rombongan Diskominsta Magelang pada akhir pertemuan juga diajak berkunjung ke Desa Sedahkidul Kecamatan Purwosari yang mana memiliki KIM berprestasi yaitu KIM Sendang Potro, untuk melihat secara langsung peranan KIM dan pelaksanaan open government di tingkat pemerintahan desa. (Nuty/Dinkominfo)

PPID Kabupaten Gresik
Belajar ke Dinas Kominfo
Bojonegoro



Berbagai prestasi yang telah diraih dan dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terutama yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro kembali menarik perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota lain untuk menjadikannya sebagai rujukan tempat pembelajaran. Setelah terakhir kunjungan Dinas Kominsta Magelang 19 September 2017 dan menjadi tujuan benchmarking Diklat PIM dari provinsi luar Jawa beberapa waktu lalu, kali ini Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku PPID Kabupaten Gresik beserta staf yang menangani masalah pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sejumlah 6 orang berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro di Gedung Pemkab Bojonegoro lantai III pada hari Rabu, 4 Oktober 2017.

Dipilihnya Dinas Kominfo Bojonegoro menjadi rujukan belajar PPID Kabupaten Gresik dalam rangka upaya terpadu untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya terkait penanganan pengaduan masyarakat dan penyediaan informasi publik, mengingat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meraih penghargaan Sistem Layanan Informasi Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Kategori A.

Sekretaris Dinas Kominfo Ngasiaji menyampaikan terkait penanganan aduan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro diantaranya melalui Dialog Interaktif setiap Jum'at siang dan evaluasi penanganan aduan melalui LAPOR dan URC yang setiap Jum'at pagi dilaporkan dan dievaluasi melalui manajemen *reviu*. Ngasiaji menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 awal kepemimpinan Bupati H. Suyoto, sampai saat ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai aduan melalui Dialog Interaktif dan langsung ditanggapi oleh SKPD yang menangani yang mana aduan-aduan tersebut juga didokumentasikan. Dan sejak pertengahan tahun 2014 juga telah menerapkan layanan LAPOR.

Ngasiaji juga menjelaskan bahwa melalui manajemen *reviu* setiap Jum'at pagi, penanganan aduan melalui LAPOR dan URC Radio Malowopati juga dievaluasi langsung oleh Bupati Bojonegoro. "SKPD-SKPD yang belum menanggapi aduan sesuai ketentuan LAPOR akan mendapat warna merah dan langsung ditegur dan terkadang diberi sanksi berdiri oleh Bapak Bupati", terang Ngasiaji. Terkait permohonan informasi, Ngasiaji juga menjelaskan bahwa permohonan informasi sesuai dengan alur yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam website PPID Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Dinas Kominfo Bojonegoro, Djoko Suharmanto menjelaskan mekanisme penanganan aduan secara langsung maupun elektronik di Bojonegoro. Dalam sejarahnya sebelum lahir Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (yang berlaku mulai Tahun 2010), sejak tahun 2008 Bupati Bojonegoro telah membuka saluran aduan melalui Dialog Interaktif, SMS

Bupati, dan facebook, anjongsana namun penanganan aduan dan aspirasi belum tersistem/terdokumentasi dengan baik. Sejak diterapkannya LAPOR pertengahan 2014 maka semua aduan dan aspirasi yang disampaikan melalui Dialog Interaktif, SMS pimpinan, SMS Radio Malowopati, WA Grup Bupati dimasukkan (diintegrasikan) ke dalam sistem LAPOR. “Jadi semua media interaksi pengaduan dan aspirasi masyarakat diintegrasikan ke dalam LAPOR dan dinamakan SIAP LAPOR (Sistem Integrasi Aspirasi Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Sehingga jika ingin menganalisa keinginan warga Bojonegoro dapat melalui LAPOR”, terang Djoko Suharmanto. Lebih lanjut Djoko Suharmanto juga menjelaskan bahwa LAPOR memiliki SOP yang mana admin utama memiliki waktu 3 hari kerja untuk mendistribusikan aduan/aspirasi kepada admin SKPD terkait. Kemudian SKPD dalam waktu 5 hari kerja wajib menjawab dan menindaklanjuti dengan tuntas.

Menurut Djoko Suharmanto hubungan SIAP LAPOR dengan PPID adalah bahwa PPID biasanya permohonan informasi dan dokumentasi secara langsung. Permohonan tersebut yang melalui media online distandardkan dengan LAPOR. “Artinya di layanan SOP PPID, kita punya waktu maksimal 10 hari kerja dan jika belum bisa dipenuhi, kita punya kesempatan perpanjangan waktu 7 hari, jadi semuanya 17 hari kerja, sehingga untuk penanganan aduan/aspirasi/permohonan aspirasi melalui media online cenderung dilayani berdasar SOP LAPOR (8 hari kerja). Sedangkan permohonan informasi secara langsung ditangani dengan berdasar SOP PPID (17 hari kerja)”, jelas Djoko Suharmanto.

Djoko Suharmanto juga menyampaikan berbagai hal unik dalam menangani permohonan informasi di Bojonegoro, beberapa contohnya adalah seorang ibu rumah tangga yang meminta 20 dokumen proyek bidang PU dan dua orang sopir yang meminta 40 dokumen proyek. Tapi memang undang-undangnya membolehkan hal tersebut. Selanjutnya terkait penanganan sengketa, saat proses penyampaian sengketa pasti didahului penyampaian keberatan. Terkait hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pembina PPID Kabupaten memimpin langsung pembahasan hal tersebut dan pasti memerintahkan agar mengacu dan patuh pada ketentuan hukum yang mengaturnya. (Nuty/Dinkominfo).

Kominfo Kabupaten Sleman, Kabupaten Purworejo, dan
Kota Cimahi Belajar OGP



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menarik perhatian Pemkab/Pemkot Kabupaten Luar Jawa Timur sebagai rujukan tempat belajar dan studi komparasi khususnya tentang keterbukaan pemerintahan, pengelolaan informasi publik dan penanganan aduan publik, yang mana hal itu merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro. kembali menarik perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota lain untuk menjadikannya sebagai rujukan tempat pembelajaran. Setelah Rabu 4 Oktober 2017 lalu PPID Kabupaten Gresik belajar tentang PPID, kali ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dan Kabupaten Purworejo Provinsi DI Yogyakarta serta Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat yang semuanya berjumlah 40 orang berkunjung ke Pemkab Bojonegoro dan secara khusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kamis 12 Oktober 2017, yang mana untuk Dinas Kominfo Kabupaten Sleman sampai tanggal 13 Oktober 2017 untuk mengikuti Dialog Interaktif di Pendopo Malowopati.

Kunjungan kerja dalam rangka belajar dan studi komparasi itu diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Helmy Elisabeth di Creative Room Lantai 6 Pemkab Bojonegoro. Sekretaris Bappeda Kota Cimahi, Chanifah Listyarini dalam sambutannya berterimakasih kepada Kabupaten Bojonegoro yang telah menerima rombongan Kota Cimahi dengan baik. Chanifah menjelaskan sekilas tentang Kota Cimahi, yakni Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan dan memiliki sebanyak 600 ribu Penduduk. Dia mengutarakan bahwa Bojonegoro memiliki banyak sekali perkembangan dan potensi, sehingga mereka ingin belajar tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait Open Government Partnership yang menjadi unggulan Kabupaten Bojonegoro.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Helmy Elisabeth dalam sambutannya menjelaskan secara singkat tentang Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas 28 Kecamatan, 419 Desa dan 11 Kelurahan. Helmy menyampaikan bahwa segala capaian Kabupaten Bojonegoro sampai seperti saat ini dan menjadi pilot project Open Government Partnership mewakili Indonesia di dunia internasional, telah melalui proses yang sangat panjang dengan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam serta dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mantan Kabag Perekonomian Setda ini

berharap bahwa kunjungan ini merupakan sarana saling belajar dan kolaborasi tentang apa saja yang bisa diadopsi dari masing-masing Kabupaten, sehingga bisa menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kominfo Kab. Purworejo, Sigit Budimulyanto menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro, pertama sebagai bentuk silaturahmi terkait urusan pemerintahan di bidang Informasi dan Komunikasi. Kedua, sebagai bentuk implementasi ASN yakni sebagai perekat Bangsa. Ketiga, keinginan untuk belajar sebanyak mungkin terutama tentang rencana aksi Open Government Partnership, Pembinaan PPID, Revolusi Data dan Tata Kelola Sistem Informasi.

Rombongan juga diajak berkeliling melihat banner keterbukaan anggaran SKPD di lantai 2 dan 4 Gedung Pemkab Bojonegoro. Selanjutnya rombongan secara khusus mengunjungi Dinas Kominfo Bojonegoro di lantai 3. Dinas Kominfo Kabupaten Sleman menyampaikan berbagai pertanyaan tentang pengelolaan dan pelayanan pengaduan masyarakat, penanganan tindak lanjut/respon terhadap pengaduan masyarakat, peran pimpinan daerah dalam upaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta pengelolaan dan pengendalian menara telekomunikasi. Mereka diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo (Ngasiaji), bersama Kabid Layanan E-Government (Alit Saksama P) dan Kabid TIK (Nuriski Imandari) untuk menerima penjelasan terkait pengelolaan aduan melalui LAPOR, penerapan aplikasi egov, dan proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK di Pemkab Bojonegoro.

Secara terpisah mereka juga diterima oleh Kabid PKP (Djoko Suharmanto) untuk menerima penjelasan tentang pengelolaan informasi publik melalui PPID, serta implementasi OGP (Open Government Partnership) sampai tingkat pemerintah desa. Djoko Suharmanto juga menjelaskan tentang strategi-strategi penanganan sengketa informasi serta penerapan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa. (Nuty/Dinkominfo)



Dinas Kominfo
Kabupaten
Banyumas Belajar
Single Data
System / Open
Data di
Bojonegoro

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan open government terus menjadi perhatian khusus bagi banyak pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dan menjadikannya sebagai tujuan tempat belajar dan menambah wawasan tentang hal tersebut.

Setelah minggu lalu 12-13 Oktober 2017 dikunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman, Kabupaten Purworejo, dan Pemerintah Kota Cimahi, kali ini dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah juga berkunjung ke Pemkab Bojonegoro khususnya ke Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro yang ingin menambah wawasan dan informasi tentang single data System/Open Data.

Bertepatan dengan hari pelaksanaan Grebeg Berkah Jonegaran 2017, rombongan yang terdiri dari 5 orang tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro (Kusnandaka Tjatur P) didampingi Kabid Layanan E-Gov (Alit Saksama P), Kabid PIAP (Sigit Jatmiko) dan Kasubag Proglap (Sutrisno MP) di ruang kerjanya, Dinas Kominfo Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3.

Regulasi tentang single data system/open data, proses, dan kendala yang dihadapi dalam dalam penerapan single data system/open data di Kabupaten Bojonegoro menjadi materi fokus yang ingin digali oleh rombongan dari Pemkab Banyumas, yang memiliki 27 Kecamatan dan 330 desa/kelurahan tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P dalam pembukanya mengulas singkat sejarah pengembangan IT di Kabupaten Bojonegoro yang telah dimulai sejak tahun 2010 yang mana saat itu telah dibangun infrastruktur fiber optic dan sampai tahun 2013 diibaratkan seperti membangun jalan tol namun yang melewati hanya dokar dan becak, karena aplikasi dan data masih terbatas. Namun dengan dorongan kuat perkembangan sampai saat ini telah ada 75 aplikasi yang diterapkan di Bojonegoro. Pengembangan dan penerapan aplikasi pun juga telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Kelola TIK dan Sistem Keamanan Jaringan. Terkait pembangunan infrastruktur jaringan pemerintah daerah tidak mungkin meniru kota-kota besar yang memiliki anggaran IT sangat besar, sehingga untuk pemerintah daerah yang anggaran IT-nya minim akan lebih ringan jika

bekerja sama dengan vendor misal dalam bentuk sewa jasa internet yang menggunakan FO dan jaringan FO-nya dapat dimanfaatkan untuk koneksi antar SKPD. Hal ini akan meringankan karena mekanisme pemeliharaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab vendor.

Selanjutnya terkait penerapan single data/open data, Sutrisno MP (Kasubag Prolap Dinas Kominfo) menjelaskan tentang penerapan baseline single data melalui aplikasi Dasa Wisma. Pengumpulan data Dasa Wisma dimulai tahun 2014 dengan cara manual menuliskan di buku dawis yang meliputi tingkat Keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian pada bulan Nopember Tahun 2015 oleh Dinas Kominfo dibuatkan aplikasi Dasa Wisma secara bertahap mengikuti kebutuhan user PKK dengan 1 form yang isinya 300 item indikator. Pebruari 2016 dimulai pelatihan inputing yang perkembangannya hanya mencapai sekitar 20% karena kendala koneksi internet di beberapa desa. Kemudian pada tahun 2017 awal, kendala tersebut diatasi dengan metode import data format excel dan hasilnya mencapai 40%. Pada sekitar pebruari tahun 2017 juga kembali dilakukan pelatihan dan sampai saat ini telah mencapai 65%. Kendala lain di lapangan juga ditemui bahwa KK (Kartu Keluarga) yang dipakai sebagai sumber data ternyata berbeda format nomor KK-nya, ada yang 14,15, 16 digit, ada yang tidak sesuai Permendagri baru, ada yang masih tulisan tangan. Padahal cukup banyak penduduk kategori miskin yang umurnya sudah tua dengan KK tipe lama tersebut. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik di sistem.

Menanggapi permasalahan perbedaan data yang disampaikan dari pihak Pemkab Banyumas, Kusnandaka menyampaikan beberapa jalan keluar yang dipakai Pemkab Bojonegoro. Untuk data statistik mengacu pada data BPS yang diakui sah secara kelembagaan dan juga data dari Dinas Dukcapil, sedangkan data Kominfo sebagai pembanding yang digunakan pada saat pelaksanaan kebijakan Bupati. Sebagai contohnya di Bojonegoro ada program bantuan DAK pendidikan yang jumlahnya 1-2 juta per siswa pertahun. Data dari Dinas Kominfo merupakan data riil by name by address untuk validasi penerima bantuan tersebut. Data Dasa Wisma yang merupakan kewenangan PKK Kabupaten Bojonegoro tersebut memiliki indikator yang lengkap dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh lembaga atau organisasi lain untuk pelaksanaan programnya. Seperti telah dilakukan oleh sebuah NGO yang memanfaatkan data tersebut untuk aplikasi revolusi data. Saat inipun di Bojonegoro, telah ada pihak perbankan yang berencana memanfaatkan data tersebut untuk program pemberian kredit. (Nuty/Dinkominfo)

Kominfo Kabupaten Wonosobo Studi Tiru di Kominfo Bojonegoro



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) nampaknya masih terus menjadi tujuan studi tiru, studi banding Dinas Kominfo dari Pemkab/Pemkot Kabupaten lain, ataupun benchmarking diklat kepemimpinan dari Provinsi lain di Indonesia. Ini menjadi amanah yang harus dijaga dan dipertahankan sekaligus menjadi dorongan Dinas Kominfo Bojonegoro untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja.

Peran Dinas Kominfo sebagai penunjang penting suksesnya penerapan open government Pemkab Bojonegoro berbasis IT kali ini kembali menjadikannya referensi studi tiru dan studi banding. Setelah 19 Oktober 2017 lalu dikunjungi Dinas Kominfo Banyumas, Jum'at 27 Oktober 2017 dari Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro, Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3 untuk studi tiru pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika.

Mengawali kunjungan studi tiru, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Wonosobo, Fatonah menyampaikan profil singkat Dinas Kominfo Wonosobo dengan tipe C yang terdiri dari 2 Bidang (Bidang IKP dan Bidang Informatika) dan 1 Sekretariat. Fatonah mengatakan bahwa mereka telah lama mengetahui profil Pemkab Bojonegoro. Dirinya saat ada kegiatan ramah HAM di Jakarta bertemu dengan Bupati Bojonegoro Dr. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto) dan mendapat penjelasan langsung tentang berbagai program dan kinerja Pemkab Bojonegoro. Hal itulah yang mendorong Dinas Kominfo Wonosobo untuk belajar ke Bojonegoro terutama terkait bidang komunikasi dan informatika. "Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga merekomendasikan untuk merujuk penerapan keterbukaan informasi publik dari Bojonegoro, kami diminta untuk melihat websitenya Bojonegoro, website open datanya Bojonegoro, dan telah melihat banyak hal dari portalnya Bojonegoro", terang Fatonah.

Selanjutnya Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Djoko Suharmanto menjelaskan terkait pelaksanaan tugas bidangnya bahwa kemitraan tidak hanya terbatas pada media pertunjukan rakyat tetapi juga bermitra dengan mitra profesi Relawan TIK, komunitas Blogger, kalangan jurnalis, maupun NGO yang lain, dan hal ini merupakan salah satu kunci sukses Dinas Kominfo Bojonegoro. Bidang PKP punya tugas rutin merawat konten semua website yang dikelola sehingga kemitraan dengan kalangan RTIK dan Blogger sangat mendukung. Dijelaskan pula bahwa KIM Bojonegoro berani mendobrak tatanan yang telah ada yaitu membentuk KIM dengan tugas yang serupa tugas Dinkominfo di tingkat kabupaten, jadi mempublikasikan, memfasilitasi interaksi, komunikasi antara masyarakat di tingkat pemerintah desa. KIM

di Bojonegoro sejak 2 tahun lalu sudah berbasis teknologi informasi, berbasis blog. Akhir tahun 2016 KIM berbasis TI diadopsi oleh Pemprov Jawa Timur, KIM adalah komunikasi dan informasi di pedesaan.

Djoko Suharmanto juga mengatakan persoalan utama yang berkembang saat ini di Bojonegoro, di pemerintah desa ada website desa (domain desa.id), PPID yang merambah sampai tingkat desa, revolusi data bersumber dari data desa wisma. Hal ini sesuatu yang membutuhkan tenaga SDM di pemerintah desa, selain itu juga ada KIM, sehingga sudah ada 4 hal yang cukup menyibukkan tingkat desa. Oleh karena itu Bojonegoro telah memfasilitasi dengan terbitnya Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi komunikasi dan informatika yaitu menjalankan dan mengelola KIM, website desa, keterbukaan pemerintahan desa, dan revolusi data. Dengan perbup itu pula dapat menjadi dasar penganggarannya di pemerintah desa.

Dalam kesempatan yang sama setelah mengikuti manajemen review bersama Kepala Dinas dan 2 Kabid dari Dinas Kominfo Wonosobo, Sekretaris Dinas Kominfo, Ngasiaji menjelaskan perjalanan panjang proses pemerintahan terbuka di Bojonegoro yang awalnya dimulai dengan Dialog Publik, anjongsana, facebook dan SMS Bupati pada kurun waktu tahun 2008-2010. Pada tahun 2013 semua ide masyarakat ditampung melalui Perbup Nomor 30 tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 Pemkab Bojonegoro menerapkan LAPOR, SISMON, Open Data dari KSP. Penerapannya melalui Perbup Nomor 42 tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Pengawasan Pengendalian Pembangunan. Pada tahun 2015 dikuatkan dengan website, PPID, info harga, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja. Kemudian tahun 2016 terbit Perbup nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KAK dan saat itu Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia dalam OGP internasional. Dan terakhir pada tahun 2017 terbit Perbup nomor 1 tahun 2017 terkait open data kontrak. (Nuty/Dinkominfo)



Kunjungan dari
Kabupaten Wonogiri



Kunjungan dari
Kabupaten
Madiun





Kunjungan dari
Kabupaten
Sukoharjo



Open Document Contract



Open Contracting Meeting
2017 di Amsterdam

<https://www.open-contracting.org/events/open-contracting-2017/>



Open Data Kontrak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



Bertempat di Productive Room lt.7 Gedung Pemkab Bojonegoro (Selasa, 12/12/2017) dilaksanakan rapat terkait persiapan peluncuran aplikasi Open Data Contract, yang rencananya akan diluncurkan pada awal tahun 2018. Aplikasi ini merupakan implementasi dari Perbub No. 1 tahun 2017.

Aplikasi open data kontrak berbasis online ini nantinya dapat di akses melalui <http://bos.bojonegorokab.go.id/>, Jadi Nanti setiap OPD harus mempersiapkan tenaga admin dari aplikasi ini.

<http://bos.bojonegorokab.go.id/> Adalah singkatan dari (bojonegoro open system) yang mana ini mengacu pada standard internasional. Dengan peluncuran aplikasi ini nanti diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik yang ingin diketahui.

Kang Yoto berharap dengan adanya aplikasi ini, ada 3 manfaat yang bisa didapatkan yang pertama, adalah ini merupakan cara pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk memastikan uang rakyat disalurkan untuk mengatasi problem rakyat. Sehingga rakyat mengetahui uang mereka sebenarnya digunakan untuk kepentingan mereka. Kedua, untuk menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki prioritas yang sesuai dengan fungsinya dan bisa dicek atau ditelusuri akuntabilitasnya untuk apa policy itu dibuat. Yang ketiga, adalah untuk memastikan kompetisi ini fair atau adil, sehingga kita bisa mencegah kecurangan. Yang keempat, apabila masyarakat ingin mengecek setiap proyek yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terlihat secara gamblang asal sumberdana, berapa jumlahnya dan untuk apa hasilnya bisa dilihat melalui aplikasi ini. Selain itu bisa untuk memudahkan auditor (BPK) untuk mengecek penggunaan dana. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi korupsi. Jadi setiap OPD tidak bisa lempar tanggungjawab apabila terjadi masalah, karena semua informasi sudah tersedia, semuanya kita buka. Mulai dari sistem lelang yang digunakan, siapa yang menang lelang, siapa yang melaksanakan/ siapa yang menjalankan dan mengawasi. (Git/Kominfo)

#BersatuMelangkahMaju

**DAFTAR KUNJUNGAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017**

NO	TANGGAL	INSTANSI/SKPD/MITRA PROFESI	KABUPATEN / KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUNJUNGAN	JUMLAH (org)	KET
1	23 Januari 2017	DPRD	Kab.Nganjuk		Pembinaan dan pengembangan UKM	3	
2	27 Januari 2017	KPK RI	Jakarta			12	
3	31 Januari 2017	DINKOMINFO	Kab. Sampang	Kepala Dinas Kominfo	Tupoksi Kominfo		
4	Januari s/d Maret 2017	Sinergantara	Bandung	Direktur Sinergantara	Game My Village		
5	16 Pebruari 2017	Sekda Nganjuk	Kab. Nganjuk	Sekda	e - Government		
6	28 Pebruari 2017	Pemkot LUBUKLINGGAU	LUBUKLINGGAU	Walikota	e - Government		
7	28 Pebruari 2017	DINKOMINFO	Kab.Bangkalan		Tupoksi Kominfo	6	
8	28 Pebruari 2017	DINKOMINFO	Ngawi		Penerapan e - Government		
9	9 Maret 2017	DPRD	Kutai Kartanegara		Study Komparatif		
10	22 Maret 2017	Pemkot Bekasi	Kota Bekasi	Walikota	Kunjungan Kerja		
11	22 Maret 2017	Kantor Staf Presiden	Jakarta		Renaksi OGI		
12	27 Maret 2017	Pemkab Tuban	Kab.Tuban		Kualitas Kehumasan, kerjasama media dan pengelolaan media center		
13	31 Maret 2017	DINKOMINFO	Kab. Sidoarjo		Pengembangan TIK	15	
14	29 s/d 31 Maret 2017	Pemkab Bandung	Kab. Bandung		Kualitas Implementasi dan regulasi e - LAPOR		
15	04 April 2017	Pemkab Ponorogo	Kab. Ponorogo		e- Monev, e-LAPOR, dan Info harga	10	
16	13 April 2017	DINKOMINFO	Kota Malang	Kabid Statistik	Konsultasi dan Koordinasi kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik	4	
17	20 April 2017	UGM	Yogyakarta		Kegiatan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencanaan Tingkat Muda Angkatan XX		
18	20 April 2017	Open Data Labs	Jakarta		Wawancara dan Observasi Lapangan Terkait Studi Kelayakan Penerapan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Daerah		
19	4 s/d 6 Mei 2017	UNAIR	Surabaya	Ketua Departemen Administrasi Negara FISIP	Kuliah tamu, mata kuliah " SON-431 Kebijakan Publik "	47	
20	8 Mei 2017	UNBRA	Malang		Studi Praktis Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNBRA	25	
21	15 Mei 2017	Pemkab Demak	Kab. Demak		Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tk IV lokus pada : 1. Dinas Kominfo terkait Open Government Patnership. 2. Dinas Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Sampah. 3. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah terkait Open Data Contract.		
22	15 s/d 16 Juni 2017	Pemkab Kendal	Kab. Kendal		Study Komparatif	10	

NO	TANGGAL	INSTANSI/SKPD/MITRA PROFESI	KABUPATEN / KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUNJUNGAN	JUMLAH (org)	KET
23	13 Juli 2017	DINKOMINFO	Kab. Bantul		Studi Banding KIM Sedah Kidul Kecamatan Purwosari	28	
24	12 s/d 16 September 2017	BPSDM	Pemprov Kalbar		Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tk IV angkatan XVIII dan XIX lokus pada : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pendapatan daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Pendidikan		
25	18 September 2017	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	Jakarta		Benchmarking Diklatpim Tk III Angkatan 2 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia		
26	4 Oktober 2017	Humas Pemkab Gresik	Kab. Gresik	Kepala Humas Pemkab Gresik	Pembelajaran Sistem Layanan Informasi Terbaik Kab/Kota Se Jawa Timur Kategoro A		
27	12 s/d 13 Oktober 2017	DINKOMINFO	Kab. Purworejo	Kadin Kominfo	Fokus kunjungan : 1. Revolusi Data 2. Keterbukaan Informasi Publik 3. PPID 4. Tata Kelola Sistem Informasi dan Keamanan Sistem Informasi		
28	12 s/d 13 Oktober 2017	DINKOMINFO	Kab. Sleman		Fokus kunjungan : 1. Pengelolaan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kab. Bojonegoro 2. Penanganan tindakanlanjut/respon Pemkab Bojonegoro terhadap pengaduan masyarakat 3. Peran pimpinan daerah dalam upaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat 4. Pengelolaan dan pengendalian menara telekomunikasi		
29	12 s/d 13 Oktober 2017	DINKOMINFO	Kab. Cimahi		Persiapan penerapan dan perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Keterbukaan Informasi Publik	13	
30	19 Oktober 2017	DINKOMINFO	Banyumas		Belajar Single Data System/Open Data	5	
31	27 Oktober 2017	DINKOMINFO	Kab. Wonosobo		Pengelolaan Tata Kelola IT	18	
32	20 s/d 30 Nopember 2017	THE WORLD BANK	JAKARTA		Mempelajari Pemetaan Data di Kabupaten Bojonegoro	11	
33	27 Nopember 2017	DINKOMINFO	Kab. Sragen		Fokus Kunjungan : 1. Implementasi Open Government 2. One Data 3. PPID 4. e- Planning dan e- Budgeting	13	

NO	TANGGAL	INSTANSI/SKPD/MITRA PROFESI	KABUPATEN / KOTA	PIMPINAN	FOKUS KUNJUNGAN	JUMLAH (org)	KET
34	7 Desember 2017	DINKOMINFO	Kab. Madiun	Sekretaris Dinas Kominfo	Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta menyatukan persepsi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sistem layanan informasi publik.	13	
35	12 Desember 2017	DINKOMINFO	Kab. Sukoharjo		Smart City	6	
36	18 Desember 2017	DINKOMINFO	Kab. Pekalongan		Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Tata Kelola Pengembangan E-Government	7	